BALAIRUNG

Senjata Itu Bernama Partai Rakyat

EDISI 56/TH. XXXVI/2021

ISSN 0215-076X

Balairung Store

Buku | Jurnal | Kaos | Totebag
Merchandise Balairung

Syahdan, gelombang massa aksi menolak RUU KPK pada September 2019 tiada mendapat respon baik dari pemerintah. Hatta pada tahun pandemi ini, pengesahan UU Cipta Kerja menyebabkan gelembung penolakan itu semakin membesar. Banyak pihak menilai pengesahan tersebut terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. Titik aksi penolakan menjalar di seluruh Kepulauan, sebut saja beberapa di antaranya: Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, hingga Ujung Pandang. Berbagai elemen masyarakat sipil meleburkan diri, membentuk aliansi-aliansi rakyat. Massa aksi menggelar "sidang"-nya dari jalan-jalan pos, sampai ke pelataran gedung parlemen.

Sejak RUU KPK disahkan sampai dengan yang paling kiwari pengesahan UU Ciptaker, rakyat mulai menunjukkan simptom ketidakpercayaannya kepada pemerintah. Dimulai dengan seruan #MosiTidakPercaya hingga #BangunDewanRakyat, rakyat mulai merumuskan berbagai bentuk politik alternatifnya untuk merespons kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat luas.

Bagaimana dengan alternatif pembentukan partai? Partai diyakini dapat menjadi corong legal-prosedural bagi tuntutan-tuntutan rakyat secara luas. Di samping itu, partai juga dinilai dapat menjadi pelaksana sekaligus pengawal kehendak politik rakyat. Lantas, berbanding dengan bermacam-macam partai peserta pemilu hari ini, apa gaung partai alternatif yang dapat 'menggelegar'?

Berbagai rekam jejak kegagalan partai alternatif di kancah perpolitikan Indonesia lalu menjadikan diskursus atas pembentukan partai tidak begitu dominan akhir-akhir ini. Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang 'garang' di periode kejatuhan Soeharto, beberapa partai buruh pasca-reformasi, dan partai alternatif lainnya, sampai dengan hari ini belum mampu merebut suara rakyat dan keluar sebagai pesaing partai-partai lama. Padahal, partai-partai lama peserta pemilu saat ini dinilai getol menyumbang perwakilan di parlemen yang tidak menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Apakah perjuangan legal-prosedural dengan memiliki partai alternatif berupa Partai Rakyat yang memadukan kekuatan buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok intelektual, masih relevan dan mustahak untuk diperjuangkan hari ini?

Menimbang diskursus politik alternatif seputar fenomena gelombang massa aksi sejak dua tahun lalu, BALAIRUNG memutuskan untuk menerbitkan Majalah Edisi 56 "Senjata Itu Bernama Partai Rakyat". Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tanggung jawab BALAIRUNG sebagai pers mahasiswa yang berkewajiban mengemukakan wacana ke tengah publik sebagaimana BALAIRUNG meyakini keberadaannya untuk tetap menjaga "napas intelektualitas mahasiswa". Tema ini kami pilih agar dapat menjadi tawaran sekaligus pertimbangan kepada khalayak luas dalam diskursus perumusan politik alternatif terkini.

Pembina Muhammad Najib Azca M.A, Ph.D **Pemimpin Umum** Fahmi Sirma Pelu **Pemimpin Redaksi** Harits Naufal Arrazie **Penulis** Afifah Fauziah Setyaningrum, Anis Nurul Ngadzimah, Han Revanda Aditiya Putra, Hana Aulia, Maghvira Arzaq Karima, Muhammad Affan Asyraf, Muhammad Fadhilah Pradana, Nadia Intan Fajarlie, Noor Rasya Swarnasta Anindyanari **Penyunting** Anggriani Mahdianingsih, Ayu Nurfaizah, Hanif Janitra Satriawan, Rizal Zulfiqri Ahmad **Kepala Penelitian dan Pengembangan** Beby Putri Adriansa Pane **Penulis** Fahmi Sirma Pelu, Harits Naufal Arrazie **Penyunting** Beby Putri Adriansa Pane **Pemimpin Perusahaan** Wida Dhelweis Yistiarani **Staf Perusahaan** Chaliza Aziz, Hana Aulia, Tara Reysa Ayu Pasya, Tiara Putri Mayza, Zarah Lyntang Astity **Kepala Produksi dan Artistik** Ananta Widi Raihan **Kurator** Ananta Widi Raihan, Rizky Ramadhika, Upavasa Cyadzidananda **Fotografer** Ananta Widi Raihan, Arjun Pratiq Zamzamy Subarqah, Fata Nur Fauzi, Fitra Anas **Ilustrator** Haifa Sausan, Inggrid D. Wijaya, Rizky Ramadhika, Samuel Johanes **Penata Letak** Clarisa Dessy Uijaya, Rizky Ramadhika, Upavasa Cyadzidananda **Ilustrasi dan Konsep Kulit Muka** Haifa Sausan

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan, dan Promosi
Kompleks Perumahan Dosen UGM, Bulaksumur B-21,
Kec. Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia, 55281

@bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C balairugpress.com jurnal.ugm.ac.id/balairung

DAFTAR ISI

Senjata Itu Bernama Partai Rakyat

© Inggrid/BAL

Jalanan kian penuh. Tangan bergandeng, mulut bersuara. Sahut-sahutan terus terdengar. Poster-poster diangkat. Terlampau jelas. Ribuan tubuh itu bukan datang tanpa kesadaran. Mereka sesungguhnya mengerti bahwa ada yang keliru. Bahwa ada upaya mengamankan 'transaksi di bawah meja', mengamankan segala bentuk laku rasuah. Anak bernama KPK yang lahir dari rahim reformasi dan tumbuh dalam suasana 'pasca otoritarian', akan dikebiri. Via undang-undang, tangan sang anak hendak diborgol, ruang geraknya hendak dipersempit. Singkatnya: dilumpuhkan perlahan.

Tiga hari berturut-turut, 23—25 September 2019, ribuan tubuh datang dari berbagai penjuru menyesaki jalan mencegah pelumpuhan itu. Titik penolakan menjalar di seluruh Kepulauan, dari Aceh, Medan, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, sampai Ujung Pandang. Hasilnya? Tak ada jawaban berarti dari 'pengetuk palu', Istana dan Senayan. Justru jawaban itu dititipkan melalui senapan dan pentungan. Yang ada dada tertembus peluru, tengkorak retak kena hajar. Darah bercucuran. Rangkaian korban bertambah memenuhi daftar berisi 1965, Tanjung Priok, Semanggi, Trisakti, Papua, dan apa-apa yang sampai sekarang nampaknya tidak akan diselesaikan.

Semakin pilu karena kejadian itu berlangsung tak lama setelah suara diberikan dalam pemilu. Mandat untuk berkuasa dititip dan diterima dengan baik, tapi para pemberi mandat diabaikan dan dianggap angin lalu.

Kita perlahan mendekati titik jenuh. Tenaga dan pikiran sudah terkuras lelah. Tuntutan harian berdatangan dalam satu tarikan nafas, memecah fokus, bersamaan dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, udara yang dibangun dari rentetan kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pembodohan, korupsi, kesenjangan, sampai bahkan hilangnya pilihan hidup. Senjata kita belum mampu membuat musuh terkapar, masih sebatas memberinya peringatan.

Setahun berselang, kala wabah kian mengkhawatirkan dan kemanusiaan berada pada titik yang paling rentan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi publik justru diketuk diam-diam. Senjata itu kembali kita gotong, kita arahkan, dan kita tembak. Aliansi-aliansi dibentuk. #MosiTidakPercaya nyaris terdengar setiap saat, sampai #BangunDewanRakyat. Energi terisi kembali. Ribuan tubuh itu kembali menyesaki jalan.

Sayangnya, setali tiga uang dengan 2019, jawaban tak berarti juga yang kita dapati. Senapan dan pentungan kian paten sebagai corong pemberi jawaban. UU Ciptaker tetap tidak dibatalkan. Penerapannya perlahan-perlahan kini mulai kita rasakan. Dalam kurun kurang lebih dua belas bulan, kita dapati lagi senjata kita belum beranjak dari 'memberi peringatan'.

Pada mulanya senjata itu memang teriak-protes. Semua energi kemarahan hendak ditumpahkan, dilampiaskan. Aksi massa adalah ekspresinya. Tentu saja, teriak-protes itu bukan tanpa dasar. Ia bertolak dari

kondisi yang ada. Sejarah panjang gerakan perlawanan dengan berbagai macam sebutannya: gerakan sosial, gerakan resistensi, gerakan anti-globalisasi, dan seterusnya, berpangkal pada teriak-protes.[1] Satu hal yang membingkai gerakan itu: keinginan akan perubahan.

Teriak-protes yang diekspresikan melalui aksi massa secara kontras menunjukkan 'siapa yang teriak-melawan' dan 'siapa yang jadi sasaran teriakan dan perlawanan'. Tak ada bantahan soal peran dan potensi yang dimiliki kubu yang teriak-melawan dalam berhadapan dengan kubu yang menjadi sasaran perlawanan. Hanya saja, dengan segenap daya gedor simbolik dan materialnya (intimidatif, kreatif, tidak terduga, intens), ia hanya bisa diaktualkan ketika bersama-sama, agar lebih nyaring bunyinya, agar terlihat jika itu tidak berasal dari yang dipaksa nelangsa. Tapi potensi itu bisa langsung redup begitu saja bersamaan dengan tuntutan yang tidak dipenuhi serta lebam yang disebabkan gebukan aparat. Aksi penolakan RUU KPK dan UU Ciptaker setidaknya membuktikan itu.

Kubu yang menjadi sasaran perlawanan sebaliknya. Mereka secara langsung mewujud dalam bentuk negara beserta aparatusnya (polisi, tentara, sampai korporasi). Mereka terkumpul dalam wadah yang sama, digerakkan oleh sistem yang sama. Ruang-ruang tempat perumusan dan pengesahan kebijakan yang berkaitan dengan nasib hidup orang banyak juga diisi oleh kubu ini. Pendeknya: kubu ini terlembaga. Berhasil mematahkan satu kebijakan yang mereka keluarkan tidak menjadi jaminan bahwa di hari depan hal yang sama akan berulang, karena pada kenyataannya, mereka tetap bisa melahirkan kebijakan serupa lagi dan lagi.

Terang saja, kondisi ini kian menunjukkan kontras senjata di antara kedua kubu yang berlawanan. Pada titik ini, kita perlu mengambil momen jenak, memeriksa kembali senjata yang selama ini kita gunakan. Kubu pertama jelas belum kalah, meski arah menuju kemenangan itu tampaknya juga belum terlihat. Kita bisa tengok kalau senjata yang kita gunakan masih terserak dan temporer. Setelah diujipraktikkan, kapasitasnya masih sebatas memberikan peringatan, belum mampu mengubah, mencegah, dan membatalkan, apalagi terlibat dalam perumusan kebijakan.

Apabila demikian kondisinya, maka kita perlu menatar senjata yang kita gunakan selama ini. Kita perlu membuatnya tidak lagi terserak dan temporer, tapi berkelanjutan serta punya program yang jelas dan terukur. Tidak hanya berhenti pada memenangkan tuntutan, tapi juga punya imajinasi atas kondisi apa yang hendak diwujudkan. Kita perlu memastikan senjata kita hadir dalam ruang perumusan kebijakan, agar sampai peluru ditembakkan, ia dapat tepat mengenai sasaran. *Toh* pada kenyataannya, berbagai studi tentang politik Indonesia kiwari menunjukkan bahwa partai-partai politik dan kompetisi perebutan jabatan publik masih didominasi oleh elite lama sisa Orde Baru.[2] Apakah kita akan tetap memperpanjang deretan kesilapan itu?

Dengan kata lain, kita perlu membangun senjata baru yang dapat menampung seluruh peluru yang terserak selama ini. Apabila melihat konteks politik Indonesia kiwari, senjata itu tak lain adalah partai politik, Partai Rakyat. Barangkali kosakata "partai" kadung punya konotasi negatif karena politisi di dalamnya adalah penyebab dari keluarnya kebijakan-kebijakan 'seenak jidat' selama ini.[3] Namun, selayaknya senjata adalah alat, partai tak lain adalah alat yang dapat kita gunakan untuk bertarung pada ranah yang memiliki akses langsung dalam perumusan kebijakan, sekaligus akses untuk mengintervensi rancangan kebijakan yang dianggap merugikan. Ia juga dapat menjadi perpanjangan tangan bermacam tuntutan yang selama ini bergema di jalan. Inspirasi Bolshevik di seantero benua kurang lebih seabad lalu, La Causa Radical di Venezuela empat puluhan tahun lalu, hingga Communist Party of India yang memerintah di Kerala dan Movimiento al Socialismo di Bolivia saat ini, setidaknya adalah sedikit referensi yang dapat dipelajari.

"Pembentukan senjata baru bernama Partai Rakyat itu tentu tidak datang dari langit. Ia adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang acapkali membuat kita harus sedikit keluar dari rutinitas perlawanan biasanya."

Pembentukan senjata baru bernama Partai Rakyat itu tentu tidak datang dari langit. Ia adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang acapkali membuat kita harus sedikit keluar dari rutinitas perlawanan biasanya. Prosesnya juga mensyaratkan negosiasi antara perbedaan-perbedaan yang ada untuk menemukan titik temu. Tentu saja, Partai Rakyat itu bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, tapi ia adalah instrumen bagi konsentrasi serta penyatuan kekuatan untuk merealisasikan tujuan. Tanpa ada keinginan untuk menyatukan secara strategis antarelemen rakyat, tampaknya sulit bagi tujuan itu untuk dapat dicapai.

Ruang-ruang penentuan nasib rakyat kini dihuni para negarawan culas dan politisi *cum* pengusaha tamak, yang terus berkembang-biak membangun dinasti dan menumpuk kekayaan melalui lubang-lubang tambang serta jutaan ton tandan-tandan sawit segar. Senjata mereka terlampau kuat. Kita perlu membangun senjata baru untuk menghadapinya. Senjata yang mampu menyatukan dan meneruskan peluru yang selama ini terserak di jalan dan terhenti di depan Senayan. Dengan begitu, senjata kita tidak hanya sebatas memberi peringatan, tapi juga punya daya untuk mengubah tatanan.

Akhir kata, selamat membaca dan melontar 'peluru'!
[Redaksi]

---

1 Stefan Berger dan Holger Nehring, "Introduction: Toward a Global History of Social Movements," dalam *The History of Social Movements in Global Perspective*, Stefan Berger dan Holger Nehring (ed.), (London: Palgrave, 2017), 1—35

2 Edward Aspinall, "A Nation in Fragments," *Critical Asian Studies* 45, no. 1 (2013): 27—54, Jamie S. Davidson, "Dilemmas of democratic consolidation in Indonesia", *The Pacific Review* 22, no. 3 (2009): 293—310, dan Olle Törnquist, "Labour and Democracy? Reflections on the Indonesian Impasse", *Journal of Contemporary Asia* 34, no. 3 (2004): 377—399.

3 Daniel Taylor, "We need a party to win revolutions, not elections," *Redflag*, https://redflag.org.au/node/6982 (diakses 11 Januari 2021)

© Fauzi/BAL

Refleksi Aksi Massa 2019—2020 dan Potensi Gerakan Rakyat

Kebijakan tak pro rakyat tetap disahkan, rentetan protes aksi massa diabaikan. Lantas bagaimana lagi rakyat mesti melawan?

Pasca-Reformasi, aksi mahasiswa dan rakyat sipil dengan jumlah besar kembali menyeruak pada 23—24 September 2019. Selain turun ke jalan, seruan aksi juga menggema di media sosial. Tagar #gejayanmemanggil, #reformasidikorupsi, dan #mahasiswabergerak menjadi *trending topic* di Twitter pada 22 September 2019. Tagar-tagar itu pula yang menjadi sebutan bagi aksi-aksi besar yang terjadi. Di Yogyakarta, aksi ribuan mahasiswa dan masyarakat yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Bergerak pada 23 September 2019 dinamakan Gejayan Memanggil. Lalu, aksi pada 24 September 2019 di Jakarta disebut sebagai aksi Reformasi Dikorupsi. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil ini diikuti oleh massa yang lebih besar dibanding peserta aksi Reformasi 1998 dan dinilai sebagai aksi terbesar di Indonesia, karena melibatkan sekitar 15 ribu orang.[1]

Aksi Reformasi Dikorupsi dipicu oleh keputusan pemerintah yang mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019. Dalam orasinya, para mahasiswa dan masyarakat sipil yang mewakili massa aksi menilai bahwa reformasi telah dikorupsi dan menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR. Massa aksi membawa tujuh tuntutan, yaitu batalkan revisi UU KPK, tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan, serta mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Selanjutnya, mereka juga menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah, serta menolak kriminalisasi terhadap aktivisme.

Tujuh tuntutan dalam aksi Reformasi Dikorupsi rupanya tidak diindahkan pemerintah. Permohonan uji formil yang diajukan sejumlah kalangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU KPK hasil revisi masih belum menemukan titik terang. Mantan komisioner KPK, Laode M. Syarif, bahkan berharap MK membatalkan UU KPK hasil revisi, karena menurutnya proses penyusunan UU tersebut cacat prosedur.[2] Pada tanggal 22 Juni 2020, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI, Yasonna Laoly, bersepakat untuk melanjutkan pemba-

hasan RKUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan.[3] Di sisi lain, RUU PKS dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 oleh Komisi VIII DPR karena alasan waktu yang terbatas.[4]

Pada awal 2020, pemerintah menyusun RUU Cipta Kerja dalam konsep hukum Omnibus Law. Sejumlah pasal, mulai dari persoalan jam kerja, pengupahan, hingga wacana penghapusan pesangon menjadi beberapa poin yang menuai polemik dan ditolak oleh sebagian masyarakat, khususnya aliansi buruh. Dilansir dari Tempo.co, Jumat 6 Maret 2020, Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) sekaligus Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas menyatakan bahwa konsep Omnibus Law diterapkan secara salah kaprah di Indonesia. Sebab, pembuatan UU tersebut mengabaikan prosedur pembentukan (formal) dan materi muatan (materiel) dalam sebuah UU. Berbagai kelompok masyarakat pun kembali menggelar aksi di tengah pandemi COVID-19 pada Maret, September, dan Oktober 2020. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut RUU Cipta Kerja dengan melakukan aksi Tolak Omnibus Law. Meskipun begitu, aksi yang dihadiri oleh ribuan massa ini tidak menghentikan pemerintah dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Balairung mewawancarai beberapa elemen masyarakat yang terlibat aksi pada 2019—2020 untuk mengetahui lebih lanjut peran dari masing-masing elemen tersebut. Juru bicara Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), Sarinah, melihat ada kebangkitan gerakan buruh pada aksi Reformasi Dikorupsi. Namun, menurutnya, kebangkitan tersebut masih bersifat spontan dan kurang didukung dengan mobilisasi yang baik. Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menjelaskan bahwa keikutsertaan KIARA di dalam aksi 2019—2020 merupakan keputusan terakhir yang dilakukan. Dia menjelaskan, selama ini komunikasi Kiara dalam sejumlah proses advokasi bersama pemerintah tidak berjalan dua arah, selalu bersifat normatif, sehingga tak jarang prosesnya berhenti. Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), secara khusus menyebut bahwa kemunculan Omnibus Law kembali mengusik urusan agraria masyarakat adat. “Tidak ada proses bagi masyarakat adat untuk memberikan persetujuan terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga akhirnya terjadi perampasan wilayah adat,” jelas Rukka.

Di sisi lain, Ulya Niami Efrina Jamson, dosen Fisipol UGM, melihat bahwa isu multisektor di dalam tuntutan aksi 2019—2020 menimbulkan dampak yang berbeda. Dia menyebut, ada suara gerakan yang saling tumpang tindih pada saat aksi Reformasi Dikorupsi. Misalnya, pro dan kontra terkait tuntutan pengesahan RUU PKS. Ketika aksi Reformasi Dikorupsi, massa aksi memang tidak satu suara dalam mendorong pengesahan RUU PKS. Ketua Pengurus Harian Jakarta Feminist, Anindya Restuviani, melihat masih banyak massa aksi yang belum melihat kekerasan seksual sebagai urgensi.[5] Sebaliknya, Pipin menilai, berbagai spektrum gerakan justru bergabung ketika aksi menolak Omnibus Law. “Kalau gerakan menolak Omnibus Law ini *kan*, massa aksi membawa satu isu untuk tolak pengesahan Omnibus Law, meskipun di dalamnya memuat aturan yang juga bisa dibilang multisektor,” tutur Pipin.

Fatimah Fildza Izzati, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai bahwa keberagaman kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi 2019—2020 dan menyuarakan beragam tuntutan tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengidentifikasi masalah. Meski begitu, Fildza menjelaskan bahwa kesadaran politik masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan karena masih belum merata. Menurut Fildza, gerakan rakyat juga perlu didorong dari sisi intelektual, bukan hanya sisi pengorganisasian. Sebab menurutnya, tidak akan ada praktik yang revolusioner tanpa teori yang revolusioner, begitupun sebaliknya. “Kita tidak bisa pasrah terhadap dinamika kekuasaan yang ada, harus melampaui itu dan harus terukur,” tegas Fildza.

Menanggapi gerakan rakyat yang terjadi sepanjang 2019 hingga 2020, Hizkia Yosie Polimpung, editor IndoPROGRESS sekaligus peneliti di Purusha Research Cooperative, menyatakan bahwa ia tidak melihat banyak perubahan di sisi tuntutan dan visi dari gerakan. Ia mengaku pesimis dengan gerakan rakyat yang dinilai tidak memiliki visi ke depan. “Dari dulu masih sama, gerakannya serba menuntut, serba protes, serba meminta, meminta keadilan, meminta rekognisi, dan seterusnya,” kritik Hizkia. Menurutnya, gerakan rakyat mesti menyusun strategi dan visi bersama melalui berbagai peran, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, agar dapat mewujudkan tujuan yang revolusioner.

Ariq Andarmesa, anggota Partai Hijau Indonesia, menuturkan bahwa gerakan 2019—2020 yang telah direncanakan tidak lepas dari spontanitas kelompok yang tiba-tiba ikut aksi. Hal tersebut disebutnya menunjukkan bahwa gerakan progresif bisa memanfaatkan momentum yang ada. Akan tetapi, menurutnya, keresahan yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat pada akhirnya tidak dapat dikelola secara terstruktur oleh gerakan progresif itu sendiri. “Sangat disayangkan berbagai bentrok dalam setiap aksi hingga adanya massa aksi yang meninggal tidak mampu memberhentikan keputusan pemerintah terhadap suatu kebijakan,” imbuhnya. Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan rakyat belum memiliki strategi politik yang jelas.

Oleh karenanya, Ariq menyampaikan tentang pentingnya menciptakan suatu organisasi bersama untuk menyatukan gerakan secara politik. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi momentum yang baik ketika gerakan protes dapat ditingkatkan menjadi partai politik. Namun, ia menyadari bahwa momentum tidak bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tawar gerakan protes menjadi gerakan politik seperti partai alternatif atau sekadar konsolidasi nasional. “Jaringan kita ini *kan* luas banyak kelompok isu yang masih terfragmentasi, satukanlah agar kita bisa maju,” pungkasnya. **[Anis, Intan]**

---

1 Gustidha Budiartie, “September Membara, Ini Rentetan Gelombang Aksi di RI”, (https://www.cnbcindonesia.com/news/20190930212817-4-103360/september-membara-ini-rentetan-gelombang-aksi-di-ri/2, Diakses pada Desember 2020)

2 Ardito Ramadhan, "Satu Tahun Revisi UU KPK, Menanti Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi...", (https://nasional.kompas.com/read/2020/10/19/07343671/satu-tahun-revisi-uu-kpk-menanti-putusan-akhir-mahkamah-konstitusi?page=all, Diakses pada Januari 2021)

3 DPR RI, “Komisi III dan Menkumham Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan”, (https://dpr.go.id/berita/detail/id/29075/t/Komisi+III+dan+Menkumham+Sepakat+Lanjutkan+Pembahasan+RUU+KUHP+dan+Pemasyarakatan, Diakses pada Januari 2021)

4 CNN Indonesia, “Komisi VIII DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020”, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630184932-32-519186/komisi-viii-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020, Diakses pada Januari 2021)

5 Nadia Intan, “Refleksi Sembilan Bulan Aksi Reformasi Dikorupsi”, (https://www.balairungpress.com/2020/07/refleksi-sembilan-bulan-aksi-reformasidikorupsi/, Diakses pada Januari 2021

Gerak Rakyat Bangun Partai Rakyat

© Haifa/BAL

Partai politik nasional turut serta mengesahkan kebijakan yang bermasalah. Alih-alih diam dan membiarkan, berbagai upaya membangun partai rakyat terus digalakkan.

"Tidak ada cara lain untuk memperbaiki nasib buruh selain dengan membentuk partai rakyat," terang Sarinah, juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR). Pernyataan tersebut ia lontarkan saat diwawancarai oleh Balairung pada Selasa (3-11). Ia memaparkan bahwa partai politik nasional yang ada sekarang tidak lagi membela rakyat. Ia memberikan banyak contoh mengenai hal tersebut, salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang merugikan masyarakat. Proses penyusunan UU Ciptaker yang tidak demokratis juga merupakan hal yang disorot Sarinah.

Sarinah menyebut bahwa kebijakan negara saat ini mengurangi proteksi terhadap buruh, dan sudah seharusnya buruh semakin sadar bahwa nasib mereka bergantung dengan kebijakan negara. Menurutnya, gerakan rakyat tidak lagi bisa menitipkan aspirasinya ke partai politik nasional. Oleh karena itu, ia menyerukan keharusan pada setiap gerakan rakyat untuk memiliki alat politik formal sendiri melalui partai rakyat. "Untuk mengintervensi kebijakan negara, kita harus berada disana," tegasnya.

Sarinah mengakui bahwa agenda membangun partai rakyat dari berbagai gerakan bukan merupakan ide yang baru. Ia memaparkan upaya penyatuan Serikat Buruh dengan elemen masyarakat yang telah dilakukan pada 2012 lalu. Yaitu Trade Union Rights Centre yang menginisiasi berdirinya Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAS). Koalisi tersebut mempertemukan serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan elemen masyarakat sipil seperti Imparsial, LBH, hingga KontraS. Namun pada Pemilu 2014, KAPAS bubar sebab KSPI menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. "Hal yang tidak bisa diterima oleh organisasi-organisasi pembela HAM," ujar Sarinah. Serikat buruh lain kemudian mengambil jalannya sendiri, seperti pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang secara formal mengonsolidasikan diri untuk mendukung Jokowi.

Selain yang dicontohkan Sarinah, ada juga elemen masyarakat lain yang berupaya membuat partai rakyat. Salah satunya adalah Partai Hijau Indonesia (PHI) yang berdiri pada 2012 di Bandung. Kami kemudian mewawancarai Ariq Andarmesa yang merupakan anggota partai tersebut. Ariq mengatakan bahwa PHI merupakan wadah politik bagi masyarakat sipil yang sepakat dengan nilai-nilai HAM, demokrasi, serta mempunyai fokus khusus pada isu-isu lingkungan hidup.

Ariq menjelaskan bahwa pembentukan PHI merupakan akibat dari kegagalan dua eksperimen politik yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Pertama*, eksperimen blok politik hijau, istilah untuk menyebut percobaan politik yang diusung gerakan beragenda keberlanjutan ekologis. Pada eksperimen tersebut WALHI mencari kandidat yang kemudian menumpangi partai politik nasional serta organisasi yang didukung dan didanai oleh WALHI. Menurut Ariq, eksperimen ini tidak mampu mengintervensi kebijakan negara. "Sebab tidak didukung dengan komitmen yang ideologis dan militan dari partai rakyat," jelasnya. *Kedua*, pembentukan sayap politik WALHI yang bernama Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Gerakan tersebut juga tumpul dalam mengintervensi kebijakan. Pada praktiknya, tambah Ariq, hanya berhenti menjadi organisasi masyarakat.

Kendati demikian, Ariq mengaku pembentukan PHI masih menjumpai berbagai hambatan. Salah satunya adalah kesulitan PHI dalam mendapatkan status badan hukum. Ia mengatakan hal itu terjadi karena terhambat oleh peraturan untuk mendapatkan status badan hukum yang sulit. Berdasarkan penuturan Ariq, keikutsertaan partai rakyat terbentur oleh UU Pemilu tahun 2017 yang memuat berbagai syarat, seperti: mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di lima provinsi dan tiga kabupaten/kota pada masing-masing provinsi yang

bersangkutan; memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu pada setiap kepengurusan partai politik; serta bagi yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat menjadi peserta pemilu. “UU Pemilu merupakan hambatan bagi gerakan-gerakan yang ingin membangun partai rakyat,” jelas Ariq.

Selain itu, adanya SHI dan PHI di blok politik hijau tidak lantas menjamin terbangunnya partai rakyat. Ariq menerangkan bahwa antara SHI dan PHI masih berdebat soal siapa yang lebih berhak mewakili sayap politik hijau. Bahkan, tambah Ariq, dalam internal SHI sendiri masih banyak yang lebih memilih jalur advokasi. “Padahal PHI butuh sumber daya SHI,” jelas Ariq. Ia kemudian menyebut bahwa perdebatan soal memilih jalur advokasi atau jalur formal hampir terjadi di seluruh gerakan rakyat.

Gerakan yang Ariq maksud persis seperti yang terjadi dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Susan Herawati, Sekretariat Jenderal KIARA, mengakui bahwa gerakannya tidak punya agenda bangun partai rakyat. Hal tersebut menjadi pilihan sebab KIARA bersama WALHI pernah mendorong lahirnya partai rakyat, namun terkendala masalah administrasi. Susan kemudian mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia berbiaya mahal. “Tidak heran ketika ada Pilkada atau Pemilu, izin-izin tambang dikeluarkan, sebab itu tukar gulingnya,” jelas Susan.

Padahal, jelas Ariq, daya tawar gerakan rakyat dalam politik informal dan politik formal harus sama-sama kuat. Ariq kemudian mendefinisikan politik informal sebagai gerakan rakyat yang memilih berjuang melalui advokasi dan protes. Sementara itu, politik formal adalah gerakan rakyat yang memilih berjuang melalui politik formal, seperti DPR, pemerintahan, atau struktural lain. Ariq melanjutkan bahwa lemahnya politik formal dari gerakan rakyat mendorong lahirnya kebijakan yang tidak merakyat, seperti UU Ciptaker serta revisi UU KPK.

Ariq kemudian menilai bahwa gerakan rakyat yang lebih memilih jalur politik informal dengan advokasi, terkesan antipolitik. Hal tersebut diucapkan Ariq lantaran menurutnya mereka tidak memanfaatkan peluang sistem politik terbuka pasca-Reformasi. Ia mengatakan bahwa mungkin mereka berpikir bahwa berjuang melalui formal hanya akan berakhir dengan sia-sia. “Pandangan semacam itu pula yang menyebabkan gerakan rakyat sering kali hanya mandek di konsolidasi," jelas Ariq.

Menambahkan Ariq, Sarinah menilai bahwa upaya advokasi hanyalah jalan untuk bersolidaritas dengan rakyat. Sebab berkaca dari pengalamannya, buruh hanya menempuh jalur hukum untuk melawan gugatan perusahaan. Sedang untuk menuntut terjaminnya hak-hak buruh, daya tawarnya tidak cukup kuat. “Hanya upaya defensif, sebab kalau kami mencari keadilan dengan hukum negara itu omong kosong,” jelasnya.

Berdasar pengalaman Sarinah di serikat buruh, ia menyebut hambatan-hambatan internal dari gerakan rakyat. Menurutnya, hambatan-hambatan tersebut merupakan warisan budaya orde baru. Ia menilai bahwa budaya orde baru telah melemahkan kapasitas rakyat dalam berorganisasi. Sarinah kemudian menyebut beberapa budaya, *pertama*, senioritas. Sarinah kemudian menilai bahwa budaya senioritas menghambat proses kaderisasi. “Mukanya itu-itu terus, yang muda tidak diberi kesempatan,” keluhnya.

Kedua, kekerasan seksual. Sarinah menilai bahwa hal tersebut disebabkan oleh belum tumbuhnya budaya penghormatan perempuan. *Ketiga*, buruknya pengelolaan keuangan. Menurut Sarinah hal tersebut berimbas terhadap korupsi dan pemborosan yang tidak perlu. Ia kemudian menyoroti ketidakmampuan serikat buruh untuk membangun partai ketika iurannya 17 miliar. “Dana malah digunakan untuk mengadakan acara di hotel besar dan mewah,” ujarnya. Sarinah kemudian mengelaborasi poin-poinnya dan mengatakan bahwa tanpa pembenahan internal, gerakan rakyat tidak akan banyak berkembang.

Agitasi dan Pendidikan

Meski dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gerakan rakyat, berbagai usaha untuk membentuk partai rakyat tetap dilakukan. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Partai Rakyat Pekerja (PRP). PRP merupakan pecahan dari Partai Rakyat Demokratik yang berdiri pada 2004. PRP bertujuan untuk mewujudkan negara sosialis dengan kesejahteraan yang merata. Iqra Anugrah, salah satu anggota PRP, menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuannya, PRP berusaha untuk lebih inklusif dengan merangkul gerakan-gerakan kiri, mahasiswa, masyarakat miskin kota, dan buruh. PRP merangkul mereka dengan cara merespons isu yang ada melalui pendidikan.

Iqra menjelaskan perlunya pendidikan di institusi yang maju seperti paguyuban karang taruna dan paguyuban Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sebab, Iqra melihat bahwa di tangan masyarakat, institusi tersebut menjadi lebih terbuka terhadap keadaan masyarakat dan mau belajar gagasan-gagasan baru. Dalam sejarahnya, tambahnya, kelompok ini punya daya pukul yang besar. Ia memberi gambaran melalui cara Partai Sosial Demokratik Jerman mengonsolidasikan dan mengorganisasi klub dansa. “Mereka bisa menjadi militan dan ideologis,” ujar Iqra.

Iqra kemudian menambahkan bahwa hal terpenting dalam membangun partai rakyat adalah dengan mengembangkan massa yang kritis. Menurutnya, gerakan rakyat perlu memenangkan wacana pembentukan partai rakyat sebagai wacana publik. Iqra yakin dengan mempopulerkan agenda-agenda seperti agenda antioligarki dan agenda sosial politik lain, memungkinkan publik untuk mendukung. “Kalau wacana publik sudah kita menangkan, gagasan partai rakyat akan mudah diterima publik,” jelas Iqra.

Tidak berbeda dengan Iqra, Fatimah Fildza Izzati, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan bahwa umumnya pengetahuan masyarakat mengenai gerakan rakyat masih minim. Ia mengatakan tidak terdapat edukasi mengenai gerakan rakyat baik di lembaga pendidikan seperti sekolah, maupun media massa. Padahal, bagi Fildza, gerakan rakyat harus mendorong kesadaran masyarakat melalui pendidikan kritis, seperti pendidikan ekonomi politik marxis dan metodologi marxisme. Sebab menurutnya, metode tersebut sangat relevan untuk memahami keadaan kini yang tendensinya ideologi liberal dan pro terhadap pasar. “Maka dari itu perlu cara untuk melampaui ideologi yang tidak ‘kiri’ ini,” imbuhnya.

Fildza menambahkan bahwa pemahaman teoretis sejalan dengan praktik di lapangan. Ia mengatakan bahwa tidak ada praktik yang revolusioner tanpa teori yang revolusioner, begitupun sebaliknya. Lebih lanjut, Fildza percaya bahwa dengan mengembangkan kedua hal tersebut, akan menghasilkan partai rakyat yang maju secara intelektual dan pengorganisasian. “Sehingga rakyat tidak lagi hanya menjadi pencoblos, namun aktor politik di setiap keputusan politik,” pungkas Fildza. **[Afidah, Fadhil]**

© Haifa/BAL

Menafsir Politik Alternatif dari Kacamata Politisi Partai

Gelombang kekecewaan mencuat akibat pengesahan UU Cipta Kerja. Pembentukan wacana politik alternatif menjadi harapan bagi gerakan. Dengan mengusung bentuk partai rakyat, bagaimana pendapat para anggota partai politik yang ada sekarang?

Gejolak penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membuat pembentukan wacana politik alternatif mencuat. Wacana ini muncul akibat ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah dan partai politik. Ketidakhadiran anggota dewan dalam menampung aspirasi kelompok yang rentan terdampak oleh pengesahan UU Ciptaker mendorong sejumlah masyarakat mengalihkan tumpuan harapan mereka pada politik alternatif. Salah satu bentuk politik alternatif adalah partai politik berbentuk partai rakyat. Berbeda dengan partai politik arus utama, partai rakyat menghimpun elemen akar rumput yang selama ini termarjinalkan dari pentas politik praktis. Keterlibatan mereka dalam sistem legislatif diharapkan mampu menghadirkan alternatif dari kepentingan elite borjuis yang selama ini mendominasi perumusan kebijakan di parlemen.

Menanggapi wacana pembentukan partai rakyat, Agus Jabo Priyono selaku Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengungkap bahwa saat ini partai rakyat sangat dibutuhkan lantaran partai yang telah ada saat ini terbukti tidak mampu menampung aspirasi rakyat dan hanya menjadi alat oligarki. Selain itu, ia menyayangkan masuknya kepentingan-kepentingan kapitalis yang da-

pat diindikasikan dengan hadirnya undang-undang yang hanya menguntungkan pengusaha. Jabo melihat dengan keadaan saat ini, sudah saatnya rakyat yang antara lain terdiri atas petani, nelayan, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya untuk membuat wadah berupa sebuah partai politik. "Partai politik ini harus dekat dengan rakyat dan melawan oligarki dan kaum kapitalis," ujarnya.

Sejalan dengan Jabo, Danang Rudiyatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, turut menyatakan persetujuannya terhadap hadirnya partai rakyat. Danang menjelaskan bahwa saat ini partai politik yang ada di Indonesia baru berbasis nasionalisme dan agama. Menurutnya, partai rakyat dapat menjadi penyeimbang iklim politik di Indonesia. Danang memproyeksikan kekuatan alternatif akan muncul dari golongan buruh, sebab gerakan ini belakangan mengalami eskalasi yang cukup signifikan. "Setelah massanya banyak, tidak menutup kemungkinan buruh menghimpun diri dalam suatu partai," ujarnya. Selain itu, orientasi menuju negara industri seiring dengan disahkannya UU Ciptaker juga menimbulkan urgensi untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi.

Meski praktis belum memiliki representasi politik di tataran parlemen, kekuatan alternatif lambat-laun telah dirintis dari bawah. Hal ini dapat dilihat dari gerakan sosial yang terus meluas seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Jabo beranggapan bahwa beragam anasir kekuatan alternatif yang sudah muncul seyogianya mampu menghimpun kekuatan guna merebut kekuasaan. Selain itu, ia menilai merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap negara telah menyebabkan akumulasi keresahan yang termanifestasikan dalam bentuk aksi penolakan terhadap berbagai kebijakan undang-undang. Hal ini pada gilirannya membuat partai-partai borjuis di parlemen tidak lagi dapat dipercaya masyarakat. Melihat fenomena ini, Jabo cukup optimis akan munculnya partai rakyat pada masa pemilihan umum mendatang. "Saya yakin akan muncul partai baru yang akan lolos *parliamentary threshold*," tegasnya.

Situasi objektif yang mendukung tidak serta-merta membuat wacana pembentukan partai rakyat melenggang tanpa halangan. Sukamta, anggota DPR RI fraksi PKS, menilai bahwa sulit membangun sebuah partai yang dapat terus eksis dan dikenal secara luas. Padahal dikenalnya partai oleh masyarakat dapat memproyeksikan lolos atau tidaknya partai dalam *parliamentary threshold*. Membuat sebuah partai baru tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan pendukung. Sukamta menambahkan bahwa kesulitan ini tidak akan ditemui jika bergabung dengan partai yang sudah ada sebelumnya. "Saya kira lebih realistis jika bergabung dengan partai yang sudah ada," jelasnya.

Terkait hambatan pembentukan partai rakyat, Danang menambahkan bahwa gerakan massa, dalam hal ini buruh, terlanjur nyaman bergerak dalam naungan serikat. Akibatnya, gerakan bersifat sporadis dan timbul-tenggelam sesuai dengan perubahan momentum politik nasional. Selain itu, absennya figur pemimpin dalam kekuatan alternatif menyebabkan wacana pembentukan partai baru tidak kunjung terealisasi. "Jika tidak ada tokoh, siapa nanti yang berani membuat deklarasi?" ujarnya.

Menanggapi pendapat Danang, Jabo berpendapat bahwa bersatunya rakyat dalam gerakan melawan dominasi oligarki akan memunculkan banyak tokoh dengan sendirinya. Bahkan ia percaya hadirnya tokoh-tokoh baru ini dapat merebut kekuasaan para pemangku jabatan yang saat ini berpihak pada kepentingan kapitalis. Untuk memunculkan tokoh-tokoh baru ini, sebelumnya diperlukan kekuatan rakyat yang berkumpul dalam satu wadah. Wadah ini nantinya yang dapat menampung gagasan dan keresahan juga terus bergerak membangun kekuatan dengan agenda utama yaitu merebut kekuasaan. "Kekuatan baru ini akan banyak memunculkan tokoh," harapnya.

Untuk membentuk partai rakyat, Danang menyebut diperlukan konsistensi dan rencana jangka panjang jika gerakan yang ada saat ini berniat mendirikan sebuah partai. Ideologi yang akan diangkat oleh partai tersebut harus jelas agar kekuatan yang sudah terhimpun pada akhirnya tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok lain. Selain itu, menurutnya diperlukan pula visi dan misi jangka panjang. Ia menambahkan pembentukan partai harus melihat kondisi Indonesia ke depan, jangan hanya berambisi untuk maju ke parlemen di pemilihan umum.

Menurut Jabo, saat ini kekuatan massa yang mendukung partai rakyat sudah ada sehingga tinggal dikonsolidasi agar massa mau bergabung untuk membentuk partai rakyat. Menurutnya hal ini dapat dilakukan dengan cara turun ke tengah-tengah rakyat untuk mengajak mereka membentuk alat baru berbentuk partai politik yang bertujuan sebagai wadah untuk mengakomodasi keperluan mereka. Konsolidasi ini diharapkan dapat menjadikan massa ini menjadi kekuatan *mainstream*. Setelah terkumpul kekuatan yang besar, Jabo mengatakan tujuan partai rakyat berikutnya adalah menang di pemilu.

"Kekuatan massa yang mendukung partai rakyat sudah ada sehingga tinggal dikonsolidasi agar massa mau bergabung untuk membentuk partai rakyat."

Namun, meskipun berhasil menempatkan perwakilannya di parlemen, tugas partai politik alternatif tidak lantas usai. Danang mengungkapkan persoalan yang akan muncul adalah persaingan ideologis dengan fraksi lain. Untuk memengaruhi jalannya perumusan kebijakan, partai politik alternatif perlu menegaskan posisinya di antara fraksi-fraksi yang terdapat di parlemen. "Narasinya harus jelas mau mendeklarasikan diri sebagai partai apa, entah itu nasionalis, agama, sosialis, atau buruh," jelasnya.

Sementara itu, Jabo beranggapan bahwa kemenangan partai politik alternatif dalam pemilu merupakan awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem parlemen, misi selanjutnya yang harus diperjuangkan partai politik alternatif adalah mencabut undang-undang yang hanya melindungi kepentingan oligarki. Setelah undang-undang lama dicabut, perjuangan dilanjutkan dengan membentuk undang-undang baru yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. "Ini demi terbentuknya tatanan baru seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yaitu Indonesia yang adil dalam politik dan makmur dalam ekonomi," tandasnya. **[Revan, Vira]**

© Ananta/BAL

Angan Partai Rakyat

Pendahuluan

Seluruh partai politik, tiada kecuali, berupaya menginisiasi peran rakyat secara luas dalam kancah politik lewat berbagai manuvernya. Namun, mengapa rakyat turun ke jalan dan memprotes kebijakan para wakil parlemen yang tiada lain adalah anggota partai—para wakilnya sendiri? Kritik atas partai politik nasional pasca-Reformasi berkutat, setidaknya, pada beberapa hal. *Pertama*, kekuatan politik yang didominasi oleh kelas pengusaha. *Kedua*, kelompok oligarki kelas Kepulauan yang menguatkan keberpihakan wakil rakyat pada kepentingan kelompoknya sendiri. *Ketiga*, nirkeberpihakan pada kepentingan rakyat.

Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, gelombang aksi massa menuntut pembatalan RUU KPK dan RUU Cipta Kerja, pada akhirnya, berbuah nihil. UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020 lalu dinilai banyak merugikan rakyat. Usman Hamid dan Ary Hermawan memaparkan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa UU Cipta Kerja dinilai sangat merugikan rakyat. *Pertama*, UU Cipta Kerja hanya akan merugikan rakyat secara luas, khususnya bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. *Kedua*, proses UU tersebut dirumuskan, dirundingkan, dan disahkan telah melanggar aturan hukum internasional. *Ketiga*, UU tersebut jelas dirumuskan demi kepentingan elite politik-ekonomi dan perusahaan asing. Secara singkat, UU Cipta Kerja adalah sebuah lisensi untuk kekuasaan mengeksploitasi pekerja dan mengeruk sumber daya alam, hutan-hutan, di mana masyarakat adat menggantungkan hidup kepadanya.[1]

Dalam pemaparan Hamid dan Hermawan, mereka mencatat beberapa kelompok yang paling dirugikan selepas UU ini disahkan, yakni kelas pekerja, petani, dan masyarakat adat. Sebelum UU Cipta Kerja ini digaungkan oleh Jokowi setahun silam, regulasi dan kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan ketiga kelompok tersebut masih jauh dari kata 'menyejahterakan'. Selama pandemi berlangsung, setidaknya YLBHI mencatat terjadi enam belas kali upaya perampasan lahan oleh pemerintah terhadap lahan rakyat.[2] Bukti ini memperpanjang rapor merah pemerintah dalam kasus agraria di Indonesia.

Sayangnya, dari berbagai kasus yang menimpa kelompok tersebut, hampir tidak ada wakil yang merepresentasikan kepentingannya di parlemen. Parlemen di tingkat regional maupun nasional masih didominasi oleh kalangan pengusaha, dan tokoh-tokoh intelektual. Partai-partai nasional yang diisi oleh kelas pengusaha memang bersikap sebagai 'pembela kepentingan rakyat' melalui manuver politik partai maupun para kadernya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), misalnya, populer dengan slogan "partainya *wong cilik*". Namun, nyatanya, berkaitan dengan UU Cipta Kerja, PDIP jadi partai yang paling *ngotot* mendorong disahkannya UU tersebut.[3]

Kekosongan perwakilan ini dapat disinyalir sebagai salah satu penyebab mengapa kelompok pekerja, petani, dan masyarakat adat, terus menjadi bulan-bulanan kebijakan pemerintah. Kelas pekerja pada 1999, 2004, dan 2009 tercatat pernah mengikuti pemilu melalui beberapa partai buruh seperti Partai Buruh, Partai Buruh Nasional, dan Partai Buruh Sosial Demokrasi. Sayangnya, partai yang diisi oleh kelas pekerja ini tidak dapat meraup suara signifikan dalam tiga pemilu tersebut. Padahal, keberadaan partai buruh dinilai dapat menja-

di satu subjek politik penting menentang dominasi kelompok elite pengusaha dan dapat menjadi representasi rakyat secara luas. Tornquist menilai partisipasi buruh dalam politik menjadi krusial dikarenakan peranan kunci mereka dalam meluaskan pemerintahan yang mewakili rakyat, meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat umum, menantang paham elitis, dan mematahkan rumusan yang berbasiskan agama dan batas wilayah.[4]

Organisasi dan serikat memang tumbuh di berbagai kota. Namun, langkah intervensi kebijakan secara formal memang belum ditubuhkan melalui upaya pembentukan partai. Padahal, menurut Aspinall dkk., sejak kejatuhan Orde Baru, partisipasi politik kelompok marjinal menjadi terbuka luas. Melihat bebalnya wakil rakyat dalam merespons tuntutan rakyat secara luas dalam beberapa aksi massa setahun belakangan ini, perlukah rakyat mengorganisasikan dirinya sendiri dan menetapkan sikapnya secara jelas di dalam parlemen? Jika memang hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa kelompok rakyat, lantas mengapa ia tetap berjalan di tempat dan belum juga meringkus partisipasi rakyat secara luas dan masif?

Mengapa partai rakyat diperlukan?

Robison mencatat bahwa pemodal nasional dan asing tidak berada dalam posisi untuk berkecimpung dalam politik nasional secara langsung. Kedua kekuatan kapital ini menyisakan ruang untuk pemerintah sebagai kekuatan yang melakukan mediasi dan sebagai fasilitator yang dapat membentuk kondisi untuk pertumbuhan kapitalisme (akumulasi modal).[5] Dengan demikian, peran pemerintah menjadi begitu krusial untuk melancarkan, membendung, atau bahkan menghentikan proses akumulasi modal kelompok pengusaha interlokal, regional, maupun lokal.

Dari data yang dihimpun Aspinall, pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah Indonesia meraup keuntungan yang signifikan selama pemerintahan Soeharto. Namun, angka ini justru berbalik pasca runtuhnya Orde Baru. Hasil alam lebih banyak dikelola oleh pihak swasta. Praktis, Indonesia cukup bergantung pada kekuatan modal kelas pengusaha. Fenomena ini ikut mendorong intervensi politik pengusaha dalam percaturan politik Indonesia. Oligarki tambang batu bara yang ramai dibicarakan pada Pilpres 2019 dapat menjadi gambaran kecil mengenai determinasi pengusaha terhadap perpolitikan nasional.[6]

Tanpa adanya kekuatan tandingan yang datang dari elemen pekerja, petani, dan masyarakat adat di parlemen, upaya penolakan terus menemui jalan yang sukar. Sebab, lewat pemaparan Robison, negara masih memainkan fungsi yang sentral dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan tidak adanya perwakilan ini, kebutuhan dan tuntutan pekerja, petani, dan masyarakat adat makin jauh dari proses penentuan kebijakan. Hal ini semakin menjauhkan imajinasi substansial rakyat perihal demokrasi yang dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan semacamnya secara luas.

Dalam catatan Juliawan dan Aspinall, tuntutan pekerja dan kelompok marjinal dalam beberapa kesempatan menemui targetnya dan berhasil mendorong perubahan kebijakan. Hal ini menandakan bahwa kelas pekerja dan kelompok terpinggirkan lainnya memiliki potensi besar untuk mengintervensi langsung kebijakan pemerintah. Namun, sikap 'reaktif' kelompok-kelompok tersebut terhadap kebijakan pemerintah juga bukan satu-satunya cara pamungkas untuk menciptakan kesejahteraan yang diinginkan. Melihat kasus penolakan UU Cipta Kerja lalu, suara rakyat di luar gedung parlemen hampir tidak menjadi prioritas untuk didengarkan. Sementara, di dalam gedung parlemen, tidak ada wakil yang dapat menentang secara lantang pembahasan dan pengesahan UU tersebut.

Seringkali, kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan baru disadari setelah media ramai memberitakannya. Ada keterlambatan respons dari elemen rakyat atas kebijakan pemerintah. Hal ini telah memakan waktu dan energi yang cukup banyak untuk mengumpulkan kekuatan turun ke jalan. Aksi massa adalah salah satu opsi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Aspinall, apa yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah "berpolitik tanpa kelompok *kiri*."[7] Artinya, tidak ada kesatuan kekuatan politik yang dapat sampai ke parlemen dengan membawa suara dan tuntutan rakyat secara luas.

Selain itu, betapa pun partai politik diidentikan dengan pemilihan umum dan segala tetek bengeknya, tidak dapat dilepaskan bahwa partai sangat berperan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik sejatinya dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa kehendaknya dengan harapan bahwa ia dapat mewujud dalam bentuk formal-prosedural agar dapat diejawantahkan pada kebijakan pemerintah. Ditambah lagi, partai politik adalah representasi atas nilai, norma, dan atau imajinasi politik suatu kelompok. Implikasi nyata dari apa yang Aspinall sebut sebagai "berpolitik tanpa kelompok *kiri*" adalah ketiadaan nilai, norma, dan imajinasi alternatif atas perjuangan dan atau cita-cita politik lain. Politik dipersempit dengan hanya melihat dinamika kampanye dan pemilihan umum yang berserak di media. Singkatnya, hampir seluruh partai politik peserta pemilu di Indonesia menunjukkan karakter sebagai *catch-all party*.[8]

Mengapa belum juga dapat ditubuhkan?

Mengacu pada hasil penelitian Aspinall dkk., persepsi demokrasi masyarakat dan birokrat di Indonesia menempati pemahamannya yang berbeda.[9] Masyarakat akar rumput memandang demokrasi dari sisi yang paling substansial, sementara para birokrat mengedepankan urusan prosedural. Masyarakat mendambakan kesejahteraan ekonomi sebagai hasil dari proses demokrasi. Sementara itu, urusan legal-prosedural seringkali absen dari fokusnya. Misalnya, lewat temuan Juliawan mengenai aksi protes buruh dalam kurun waktu 2005—2009, buruh, pada umumnya, masih berkutat dengan euforia kebebasan berpendapat sebagai implikasi keruntuhan Soeharto dan memori keberhasilan 1998.[10]

Pada pemilu 1999, 2004, dan 2009, dari beberapa partai buruh yang berhasil ditubuhkan, suara yang diraup belum berhasil menempatkan perwakilan kelas pekerja di parlemen. Aksi protes menjadi satu bentuk intervensi politik paling populer di tengah kelas pekerja, begitu juga dengan elemen rakyat lainnya.[11] Hanya saja, menyingkirkan urusan prosedural dalam pemahamannya atas demokrasi justru berimbas rugi. Pasalnya, para elite politik terus menjadikan kelompok-kelompok termarjinalkan sebagai sesumbar politiknya meraup suara. Sesumbar berakhir sesumbar. Praktiknya, kelas pekerja, petani, dan masyarakat adat selalu kehilangan daya tawarnya dalam menentukan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan dirinya.

Dari faktor internal elemen rakyat, bayangan mengenai intervensi politik langsung dengan langkah le-

gal-prosedural masih jauh dari keterbentukan konsep dan langkahnya. Misalnya, lewat narasi yang dibangun oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di Yogyakarta, berbagai elemen yang tergabung akhir-akhir ini melempar wacana "Bangun Dewan Rakyat!".[12] Dalam simulasinya 11 Oktober 2020 lalu, konsep intervensi politik alternatif ini masih belum dapat menjelaskan langkah praktis dan taktisnya. Simulasi hanya berisi pemaparan kasus kesewenang-wenangan pemerintah terhadap kelompok masyarakat tertentu. Masih belum jelas apakah Dewan Rakyat yang dimaksud oleh ARB adalah sebuah konsep politik alternatif atau sebuah aksi protes mendelegitimasi peran parlemen yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan khalayak luas.

Propaganda dari berbagai aliansi dan gerakan belum beranjak dari hal serupa. Wacana yang didorong masih berupa penolakan keputusan tertentu dan upaya menuntut parlemen untuk segera membenahi kesalahannya. Penolakan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masih berada pada tataran aksi protes. Langkah taktis dari aliansi dan gerakan yang meleburkan berbagai elemen masyarakat, masih belum menunjukkan langkah legal-prosedural lewat pembentukan partai politik.

Sebagai ilustrasi, Tornquist menilai imajinasi politik buruh secara khusus dilemahkan oleh dominasi Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun lebih.[13] Hal ini ikut mendorong kecakapan dan proses berkembang serikat-serikat buruh untuk melakukan intervensi politik pada tataran formal prosedural. Belum jauh beranjak ke hal yang prosedural pun, banyak organisasi buruh justru disibukkan dengan masalah internal terkait kematangan mengelola organisasi dan elitisme tokoh organisasi. Ditambah lagi faktor eksternal lain yang menunjukkan belum signifikannya gerakan kelas pekerja ini ditandai dengan survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia "Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Legislatif 2009". Survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui keberadaan Partai Buruh, mayoritas buruh tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait visi, misi dan, program (platform) partai politik, dan mayoritas buruh masih menghendaki Serikat Buruh tidak terlibat dalam urusan politik praktis.[14]

Politik nir imajinasi

Dari berbagai narasi tuntutan, aliansi, dan gerakan menolak UU Cipta Kerja setahun belakangan ini, tidak hadir secara gamblang perencanaan pembentukan partai sebagai salah satu jalan politiknya. Banyak pihak tampak berhati-hati, mencoba mencari jalan keluar lain, atau memang ide itu tidak pernah tumbuh di tengah massa.

Partai dengan cita-cita sosialisme yang dapat menjadi representasi atas kebutuhan kelompok marjinal di Indonesia pun mengalami banyak perpecahan yang membuat kekuatannya ikut melemah. Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mengambil peran dalam Reformasi 1998 terpecah ke dalam beberapa partai kiri sampai dengan saat ini, yakni Partai Pembebasan Rakyat (PPR) dan Partai Rakyat Pekerja (PRP)—kemudian terpecah melahirkan Komite Penyelamat Organisasi Partai Rakyat Pekerja (KPO-PRP). Perpecahan di tubuh kekuatan kiri yang menjadi patron atas tuntutan kelompok marjinal menjadi satu catatan buruk. Hal ini turut mendorong berbagai aliansi dan gerakan untuk bersikap lebih hati-hati dalam merumuskan kendaraan politiknya.

Ford mencatat bahwa buruh di Indonesia pada periode 2000-an melihat dirinya sebagai kekuatan pengawas dan pengontrol kerja pemerintah. Pemahaman demikian hadir di tengah buruh di samping kepercayaan bahwa buruh memiliki peran sentral dan dapat melakukan intervensi lebih jauh dalam dinamika politik Indonesia. Di antara elemen masyarakat lainnya, kelas pekerja adalah elemen yang berpotensi signifikan memiliki partai politik. Secara historis, kelas pekerja mencatat rekam jejak yang cukup panjang berada dalam dinamika perpolitikan nasional suatu negara.[15] Sebagian besar negara di Eropa Barat masih memiliki partai buruh yang ikut serta dalam pemilihan umum. Misalnya, Inggris, Partai Buruh—mencalonkan Jeremy Corbyn sebagai Perdana Menteri pada pemilihan umum terakhir—masih eksis hingga saat ini dan menjadi salah satu partai terbesar di Inggris. Beberapa negara lainnya seperti Belanda, Perancis, Jerman, dan beberapa negara Skandinavia masih memiliki partai buruh yang konsisten menjadi peserta pemilihan umum sampai dengan hari ini.

Di Indonesia, gaung partai buruh, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, tidak mendapatkan sahut yang berarti dari publik. Kendati demikian, aliansi dan gerakan yang praktis menjadi pengawal kebijakan negara akhir-akhir ini belum secara gamblang mengampanyekan jalan formal. Sejauh ini, gerakan dan aliansi masih bergerak secara sporadis. Pergerakan yang masif dilakukan oleh gerakan dan atau aliansi di berbagai kota sangat bergantung pada isu-isu yang berkembang. Gerakan dan aliansi yang diisi oleh berbagai elemen itu didorong untuk menjadi ruang cepat tanggap atas situasi yang berlaku. Masalah besar dengan tuntutan yang besar harus tumbang dalam sebuah konsolidasi dan aksi cepat. Cukup berat.

Pengawalan isu pun menjadi begitu berpendar. Padahal, menurut Alayubby, jauh sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kelompok buruh telah lama menjadi bulan-bulanan kebijakan pemerintah Indonesia.[16] Angan kesejahteraan pekerja tidak lantas diluluhlantakan pasca keberadaan UU Cipta Kerja. Sementara itu, kebijakan yang menjauhkan kesejahteraan dari buruh telah ada bertahun lamanya sebelum UU Cipta Kerja yang dibicarakan hari ini. Dengan adanya UU itu, kondisi itu kian diperparah.

Menurut sejarawan Lucian Jaume dan Maurice Agulhon, proses demokratik termaktub dalam pencapaian hak atau dalam penubuhan simbolisme dan prinsip-prinsip politik baru yang merupakan hasil dari pergerakan kemarin dan hari esok.[17] Jika melihat bahwa pergerakan kini berada di tengah-tengah model dan prinsip gerakan kemarin dan hari esok, model dan prinsip seperti apa yang digunakan di hari depan? Apa yang dapat dipelajari dari gerakan rakyat yang masih sporadis dan gagalnya partai buruh mendulang suara di hari kemarin?

Jika reaksi publik atas UU Cipta Kerja menjadi sangat holistik, bahwa keberadaannya telah menjadi ancaman utama bagi kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat, justru kian sulit dengan tidak adanya pengawalan masif yang konsisten dan terunifikasi. Berbagai pergerakan masih berbentuk parsial. Cukup mengkhawatirkan bahwa pola gerakan demikian justru makin menguatkan dugaan Max Lane bahwa pergerakan akhir-akhir ini memang belum masif dan tidak dapat bergerak ke arah yang lebih signifikan.[18]

Boleh jadi, fenomena ini telah mengindikasikan bahwa pergerakan kiwari berada pada bahaya krisis imajinasi politik. Imajinasi menurut, Castoriadis, adalah dimensi sosial dan individu yang membentuk konstruksi atas kemungkinan realitas, selama ia bergantung pada kapasitas imajinatif dan kreatif dari manusia.[19] Imajinasi

adalah dimensi krusial dan sumur kehidupan sosial. Ia adalah kapasitas kolektif untuk membentuk *forms*, presentasi, dan presentasi diri sebagai seorang manusia atau sebuah masyarakat.[20]

Tentu saja, masyarakat yang mengidamkan wajah substantif dari pemilihan umum demokrasi telah mengimajinasikan sebuah realitas kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, dan lainnya bagi diri dan atau kelompoknya. Namun, dengan ketiadaan bayangan formal-prosedural itu, ia hanya menjadi angan belaka. Partai rakyat yang mungkin hadir di tengah oase ini di satu sisi dapat menjadi determinan atas pembentukan imajinasi politik masyarakat. Menurut Diehl, imajinasi ikut mendorong signifikansi atas penubuhan model kepercayaan, mengangkut realitas dari pola keorganisasian yang spesifik, dan menghadirkan persepsi atas dunia.[21]

Penutup

Keberadaan imajinasi atas cita-cita dan proses politik tidak dapat diubah semata lewat gerakan spontan yang bergantung pada isu-isu khusus. Ia perlu berbentuk sesuatu yang padu dan memiliki proyeksi jangka panjang. Sebab, realitas politik kiwari menghadirkan sedikit sekali ruang bagi rakyat untuk menyuarakan suaranya. Argumen Castoriadis dan Diehl sebelumnya, setidaknya, menuntut sebuah prasyarat, yakni keberadaan sebuah ruang pendidikan politik bagi rakyat. Untuk dapat mencapai kesadaran politik bahwa rakyat adalah subjek aktif atas dinamika kenegaraan, partai rakyat tidak hanya dapat berperan sebagai sebuah 'mesin' politik pemilu, melainkan juga ruang pendidikan politik itu sendiri.

Tentu saja, pekerjaan rumah bagi gerakan rakyat adalah tugas bagi setiap elemen yang menginginkan cita-cita demokrasi itu terwujud. Napas partai politik tidak saja berakhir pada ajang pemilu, melainkan urusan substansial partai sebagai sebuah ruang politik adalah satu hal yang wajib terpenuhi, ruang ini tetap perlu menyasar kesadaran prosedural tadi. Bahwa cita-cita demokrasi dapat ditempuh lewat prosedur tertentu yang menghadirkan 'lawan politik rakyat' dalam satu arena pertempuran. Pada fase ini, seluruh potensi dan wacana yang didorong partai rakyat akan bertarung merebut kesadaran masyarakat secara luas.

Akan tetapi, apakah proyeksi atas langkah prosedural itu ikut terbayang dalam cita-cita demokrasi pada tataran politik imajiner sebagian besar dari rakyat saat ini? Partai rakyat, benar, merupakan pengejawantahan komitmen prosedural itu. Namun, dapatkah ia menciptakan karakter politik, meminjam argumen Lefort, yang menunjukkan pemahaman atas tanda-tanda elaboratif imajinasi di mana relasi-relasi sosial diasumsikan untuk diorganisasikan, keluar dari ketergantungan, dan menjadi subjek atas kehendak serta pemahaman atas manusia, serta di sisi lain, tanda-tanda dari kebaruan intelektual, moral, dan religius?[22]

Karakter politik demikian diperlukan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Tahap yang dapat dilalui lewat berbagai cara menciptakan momentum politik—salah satunya lewat agenda pendidikan politik dan Pemilihan Umum—dengan harapan dapat membawa implikasi pada pembentukan prinsip kesetaraan, kebebasan dan, hak asasi manusia. Dengan demikian, prinsip tersebut telah mengaktifkan imajinasi sosial untuk memahami masyarakat dalam bingkai emansipasi. Dengan kata lain, orang-orang menyadari dirinya sebagai seorang warga sipil yang mengambil bagian dalam proses politik.[23]

Fakta lain menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2002 memuat larangan atas keterbentukan aliansi antara elemen buruh dengan elemen lainnya seperti organisasi petani, dan kelompok intelektual. Ini menunjukkan bahwa realitas politik kiwari menghadirkan sedikit sekali ruang bagi berbagai elemen rakyat untuk menyuarakan suaranya. Padahal, menurut Arif Hermawan, penubuhan aliansi antarelemen buruh, tani, kelompok intelektual dan lainnya menjadi sangat diperlukan demi meningkatkan posisi politisnya dengan kelas pengusaha dan negara.[24] Dengan demikian, dalam konteks politik Indonesia kiwari, penubuhan partai rakyat menjadi krusial dalam upaya mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri. Dengan keberadaan partai rakyat ini pula, jalan formal prosedural yang setelah sekian lama absen dari dinamika politik rakyat kini dapat dibayangkan, diperjuangkan dan menemui gelanggang politiknya. **[Fahmi]**

1 Usman Hamid dan Ary Hermawan, “Indonesia’s omnibus law is a bust for human rights”. *New Mandala*, 9 Oktober 2020. https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/ diakses pada 29 Oktober 2020.
2 Hamid dan Hermawan, “Indonesia’s omnibus law is a bust for human rights”.
3 Tempo, “PDIP akan Bentuk Tim untuk Mendukung Omnibus Law.” T empo.co, 7 Maret 2020. PDIP akan Bentuk Tim Kajian untuk Mendukung Omnibus Law - Nasional *Tempo.co* diakses pada 25 Desember 2020 ; Tirto, “Jokowi dan Puan Maharani: Duaet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law. *Tirto.id*, 20 Oktober 2020 Jokowi & Puan Maharani: Duet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law - Tirto.ID diakses pada 27 Desember 2020.
4 Olle Tornquist, “Why is Organised Labour Missing from the Democracy Movement?” *Inside Indonesia* 86.
5 Richard Robison, Indonesia: *The Rise of Capital* (North Sydney, Allen & Unwin): x.
6 Lihat Watchdoc Image, Sexy Killers, Watchdoc. Video (2019) mengenai Pilpres 2019 dan oligarki tambang https://www.youtube.com/watch?v=qlB7vg4I-To diakses pada 4 Desember 2020.
7 Edward Aspinall, “Still an age of activism,” *Inside Indonesia*, 22 Januari 2012. https://www.insideindonesia.org/still-an-age-of-activism diakses pada 4 Desember 2020.
8 Istilah ini dikemukakan oleh Kircheimer. *Catch-all party* berasal dari partai massa yang sudah kian professional secara keorganisasian namun menurunkan profil ideologisnya untuk menggaet elektabilitas lebih luas alih-alih meraup suara dari kelompok kelas dan basis agama juga sosial. Lihat Andre Krouwel, “Party Models.” *Handbook of Party Politics* (London, SAGE): 250.
9 Edward Aspinall, dkk, “Elites, masses, and democratic decline in Indonesia,” *Democratization* 27(4): 506.
10 Benny Hari Juliawan, “Street-level Politics: Labour Protests in Post-authoritarian Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia*, 41(3): 349—370.
11 Juliawan, “Street-level Politics”: 355.
12 BALAIRUNG, “Tolak UU Cipta Kerja, Aliansi Rakyat Bergerak Serukan Bangun Dewan Rakyat”. *Balairungpress*, 21 Oktober 2020. https://www.balairungpress.com/2020/10/tolak-uu-ciptaker-aliansi-rakyat-bergerak-serukanbangun-dewan-rakyat/ diakses pada 7 Januari 2021.
13 Olle Tornquist, “Labour and Democracy? Reflections on the Indonesian Impasse,” *Journal of Contemporary Asia* 34(3): 1—4.
14 Launa, “Editorial”. *Jurnal Sosial Demokrasi* 10 (2011): 10-11.
15 Tentang politik buruh, lihat (Amerika Latin) Levitsky dan Mainwaring (2006); (negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Timur) Borisov dan Clarke (2006); dan (Taiwan dan Korea Selatan) Buchanan dan Nicholls (2003), dan Kong (2004).
16 Alfian Al Ayubby. “Sebelum UU Cipta Kerja Disahkan, Situasi Perburuhan di Indonesia Sudah Buruk (Bagian I & II).” *Indoprogress.*
17 Lucien Jaume, “Citizen and State under the French Revolution,” (ed.) Q. Skinner dan B. Straht, *In States and Citizens: History, Theory, Prospect* (Cambridge: Cambridge UP): 131–144; M. Agulhon, *Marianne au combat: L’imagerie et la symbolique républicaine de 1789 à 1880*(Paris: Flammarion) dan *Marianne au pouvoir: L’imagerie et la symbolique républicaine de 1880 à 1914* (Paris: Flammarion).
18 Max Lane, “Partai Rakyat atau Partai Alternatif: Apa Itu?” *Majalah Balairung edisi* 56: 2 6.
19 Cornelius Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society* (Cambridge: MIT Press): 247.
20 Cornelius Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society* (Cambridge: MIT Press): 249.
21 Paula Diehl “Temporality and the Political Imaginary in the Dynamics of Political Representation”. *Social Epistemology*: 6.
22 Claude Lefort, “Interpreting Revolution Within The French Revolution,” *Democracy and Political Theory* (Cambridge: Polity Press): 93.
23 Claude Lefort, “Interpreting Revolution Within The French Revolution,” *Democracy and Political Theory*: 93.
24 Kanal Pengetahuan FH UGM, Refleksi May Day dari Guru Besar Ketenagakerjaan UGM - Prof. Dr. Arif Hernawan. Video (2018) https://youtu.be/dEa89TSteVQ diakses pada 12 Januari 2021.

© Arjun/BAL

Ribuan massa aksi Gejayan Memanggil (23-9-2019).

Selayang Pandang Aksi Massa Menggugat Omnibus Law

© Ananta/BAL

Longmars massa aksi #GejayanMemanggil2 (30-9-2019)

Orasi masyarakat pada aksi bertajuk “Rapat Rakyat, Mosi Parlemen Jalanan” (9-3-2020). © Anas/BAL

Jalan Gejayan merekam jejak aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta. Aksi pertama terjadi pada 23 September 2019 yang disebut sebagai Gejayan Memanggil I. Lebih dari lima ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta melakukan longmars menuju pertigaan Jalan Gejayan. Massa aksi membawa beberapa tuntutan, misalnya batalkan revisi UU KPK, tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan, serta mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Aksi kedua terjadi berselang seminggu setelahnya, yaitu pada 30 September 2019. Mahasiswa, pelajar dari Aliansi Pelajar, masyarakat umum, penyandang disabilitas, petani, dan seniman mengikuti aksi ini. Di saat yang sama, ratusan massa dari Forum BEM DIY (FBD) dikerahkan ke Gedung DPRD Yogyakarta mengajukan sepuluh tuntutan. Aksi ditutup dengan penandatanganan surat tuntutan oleh Wakil Ketua DPRD dan salah satu anggota Fraksi PSI.

Pembakaran ban bekas sebagai respons atas pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR (5-10-2020). © Harits/BAL

Bentrokan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta setelah aparat menembakkan gas air mata (8-10-2020) ©Rizky/BAL

Massa aksi di depan kantor DPRD DIY membuka jalan untuk ambulans (8-10-2020). ©Anas/BAL

Daerah sekitar Tugu di Yogyakarta ikut merekam salah satu aksi yang berisikan penampilan Panggung Rakyat dari penggiat seni. Beberapa bulan setelahnya, pada 9 Maret 2020 kembali dilakukan aksi di Jalan Gejayan. "Tolak, tolak, tolak omnibus law. Tolak omnibus law sekarang juga." menjadi nyanyian senada dengan tuntutan yang dilayangkan, yaitu menolak Omnibus Law. Pada 16 Juli 2020 dan 14 Agustus 2020 juga dilakukan aksi dengan tuntutan yang sama seperti sebelumnya.

Sampai pada akhirnya Omnibus Law disahkan, dilakukan aksi di Jalan Gejayan pada 5 Oktober 2020. Massa aksi merespons dengan membakar ban bekas di tengah Pertigaan Gejayan sebagai wujud kemarahan. Pada 7 Oktober terdapat aksi bertajuk Mosi Tidak Percaya kepada Rezim Jokowi-Ma'ruf: Cabut Omnibus Law dilakukan oleh sekitar seratus orang yang tergabung dalam Aliansi Seruan Mahasiswa.

Pada 8 Oktober 2020 kembali dilaksanakan aksi di berbagai kota menolak Omnibus Law. Di Jakarta dan Yogyakarta terjadi bentrok antara aparat kepolisian dengan massa aksi. Terakhir pada 20 Oktober 2020 dilaksanakan aksi bertajuk "Sidang Dewan Rakyat" merespons ketidakadilan yang dicerminkan oleh DPR melalui Omnibus Law. **[Ananta]**

Kirimkan jawaban Anda ke *balairungpress@gmail.com* sebelum 11 September 2021 dan dapatkan Jurnal BALAIRUNG Masyarakat Pesisir serta Pandemi.

MENDATAR

1. Minuman tradisional Minahasa
5. Waktu sesudah tengah hari
6. Pengelompokan bilangan sejumlah 12
8. Skor nol dalam bulutangkis
10. Babak perpanjangan waktu dalam sepak bola
12. Tidak berwujud, abstrak
14. Midoriya Izuku
16. Alat membatik
19. Julukan tokoh Pengoceh dalam novel *Sang Pengoceh*
20. Pohon dengan akar gantung
22. Blitzkrieg Bop
23. Pulau di sebelah timur laut Jawa Timur
25. Mereka (Papua)
27. Tokoh utama novel *Gadis Pantai* karangan Pramoedya Ananta Toer
29. Batas
30. Celana dalam
32. Ibu kota Peru
36. Pemenang Piala Dunia 2018
37. Top skor Piala Dunia 2018
38. Yang hilang menjadi ... di setiap Kamis, nyali berlapis (Efek Rumah Kaca—Jingga)
40. Saya (Maluku)
42. Kapten kapal
45. Universitas di Inggris
46. Grup Hip-hop asal Bandung yang sudah bubar, dibentuk pada 1994
48. Gedung Pusat UGM
49. Penulis puisi Nyanyian Angsa
52. Sukar, sulit, pelik
54. Peka
55. Online
57. Gunung di Flores, NTT yang di puncaknya terdapat danau tiga warna
58. *Setan Van Oyot*
60. *Thread*
63. Klub promosi Liga Inggris 2020/2021
64. Warna air putih
65. Bentuk baku dari notulensi
66. Nominal pecahan rupiah terbesar
69. Ibu kota Jawa Timur
70. Bersifat bertentangan
71. Ibu kota Ceko

MENURUN

2. Perebutan kekuasaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Penerbit buku yang didirikan oleh Hasjim Rachman, Joesoef Isak, dan Pramoedya Ananta Toer
7. Juara Serie A 2020/2021
9. Parijs van Sumatra
11. Warna sabuk taekwondo setelah putih
13. Vladimir Ilyich Ulyanov
15. Korupsi
17. Album The Adams yang rilis tahun 2019
18. Negara di Benua Pasifik
21. *Single* White Shoes and the Couples Company dalam album "2020"
24. Gunung tertinggi di dunia
26. Tahun 2021 menurut kalender Cina
28. Hiasan leher berwiru, diikat seperti dasi (Belanda)
31. Perairan tenggelamnya kapal Van der Wijk
32. Lembaga Survei Indonesia
33. Bulan setelah Agustus
34. Dewan Kesenian Jakarta
35. Musim dimulai bulan Desember di Eropa
39. Bunga berwarna ungu
41. Salah satu instrumen dalam orkes gamelan
43. Angkatan Udara Britania Raya
44. Komunitas Utan Kayu
47. Prakarsa
50. Daerah Istimewa Yogyakarta
51. Kehadiran (Antonim)
53. Penjaga gawang
56. Bahasa resmi di Republik Turki
59. Novel karangan Budi Darma
61. Ibu kota Jepang sebelum Tokyo
62. Lembaga Kebudajaan Rakjat
67. Kokoh (Antonim)
68. Wartawan *Bernas*, Yogyakarta yang dibunuh pada 1996

Wacana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja bergulir sejak pidato pelantikan masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo Oktober 2019. Awal kehadirannya telah menuai pertentangan dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah. Kalangan intelektual hingga sipil sepakat akan substansinya yang melanggengkan kesejahteraan oligarki dan menindas rakyat. Hingga tahun berganti dan wabah COVID-19 menyerang, seruan aksi tersebut terus bergema.

Namun, berbagai pertentangan tak lantas menyurutkan langkah lembaga legislatif dalam meresmikan aturan tersebut secara terburu-buru pada 5 Oktober 2020. Penetapan UU Cipta Kerja tersebut memunculkan beberapa pertanyaan penting, yakni apakah pengesahan UU Cipta Kerja menandakan pengumpulan gerakan rakyat? bagaimana permasalahan ini dapat menjadi momentum bagi kekuatan gerakan rakyat dalam bentuk partai politik? Untuk menjawabnya, Balairung berkesempatan untuk mewawancarai Nining Elitos. Ia adalah Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan salah satu pentolan gerakan menolak UU Cipta Kerja.

Menurut Anda, apa itu gerakan rakyat?

Berbicara tentang gerakan rakyat adalah berbicara tentang gerakan perlawanan. Aktor yang terlibat pada gerakan rakyat ini adalah seluruh komunitas masyarakat, mulai dari pemuda, perempuan, petani, nelayan, dan lain-lain. Seluruh komponen masyarakat dapat dimasukkan dalam gerakan rakyat karena saat ini mereka adalah korban struktural dari sistem regulasi pemerintah.

Gerakan perlawanan ini termanifestasikan dalam bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat. Mulai dari hal yang fundamental seperti diskusi dan membaca buku untuk menguatkan ideologi, merumuskan gagasan, serta melatih disiplin dan kemandirian. Hal itu penting untuk diupayakan supaya gerakan perlawanan tidak sekadar menjadi gerakan yang reaksioner belaka, tetapi mampu menciptakan aksi rakyat yang terdidik, terlatih dan memiliki konsistensi untuk fokus kepada kepentingan rakyat.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai gerakan rakyat #TolakOmnimbusLaw, dan hal apa saja yang mendasari pentingnya gerakan rakyat tersebut?

Sejak awal, sikap saya sama dengan rekan-rekan di KASBI, yaitu mengkritik keras perumusan dan pengesahan UU Cipta Kerja. *Pertama*, kami menilai bahwa proses perumusan aturan ini jauh dari keterbukaan dan mengabaikan partisipasi publik. Hal ini ditandai dengan tidak disebarluaskannya draf UU Cipta Kerja ke khalayak umum dan pembahasannya yang terburu-buru.

Kedua, UU Cipta Kerja ada hanya untuk kepentingan kaum kapitalis dan oligarki yang dekat dengan kekuasaan. Hal itu dapat dilihat dari komponen anggota perumus undang-undang tersebut didominasi oleh kelompok pejabat dan pebisnis. Kepentingan mayoritas rakyat tidak diakomodasi oleh aturan tersebut.

Ketiga, argumentasi pemerintah dan DPR dalam mengesahkan UU Cipta Kerja sulit dibenarkan. Pemerintah dan DPR menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja dapat memberikan kepastian kerja, kesejahteraan, dan keterbukaan ruang demokrasi. Namun, melalui penelusuran kami terhadap UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 dan UU Pokok Agraria Tahun 1960, dampak UU Cipta Kerja justru bertentangan dengan yang dikatakan oleh pemerintah dan DPR. Saat ini, pagebluk COVID-19 telah membuat rentan posisi masyarakat terhadap pekerjaannya. Pengesahan UU Cipta Kerja secara terburu-buru hanya akan memperparah kerentanan tersebut. Hasilnya, masyarakat terpicu untuk melakukan aksi besar di berbagai daerah. Namun, aksi tersebut tidak cukup membuat pemerintah mengurungkan niat untuk mengesahkan aturan tersebut.

Belajar dari pengalaman tersebut, kita jadi tahu bahwa selama ini lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik. Mereka bertanggung jawab kepada rakyat, namun, ironisnya, tidak mampu menampung aspirasi sebagian besar masyarakat. Sikap tidak acuh mereka mencerminkan bahwa kepentingan publik bukan hal yang penting dalam dinamika perumusan kebijakan ini.

Reformasi Ge
Berbasis Pa

Melihat partai politik progresif yang kerap berakhir mengecewakan, masih perlukah untuk mendirikan suatu gerakan rakyat berbentuk partai politik kembali?

Jika kita menilik sejarah, rezim Orde Baru sebenarnya kandas oleh kekuatan rakyat yang dilakukan secara kolektif. Kekuatan rakyat ini terwujud melalui revolusi. Namun, perlu kita ketahui, pengalaman penumbangan rezim Orde Baru oleh kekuatan rakyat tersebut juga memiliki kelemahan. Hal itu terbukti ketika memasuki jalan pemilu di mana agenda reformasi tak bisa menyiapkan kepemimpinan yang berasal dari rakyat.

Kelemahan ini harus diselesaikan apabila melihat situasi sekarang di mana kepentingan mayoritas masyarakat semakin diabaikan oleh pemerintah. Kita telah sampai di tahap krisis kepercayaan kepada pemerintah. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkannya tak mampu lagi mengakomodasi kepentingan publik. Kebijakan yang justru mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat itu banyak, salah satu contohnya adalah pengesahan UU Cipta Kerja. Bagi saya, penting untuk membentuk sebuah partai, meskipun nantinya membutuhkan proses konsolidasi yang panjang. Partai tersebut harus membawa cita-cita besar masyarakat, dan tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat.

Runtuhnya partai politik progresif terdahulu seharusnya mampu kita jadikan bahan pembelajaran untuk memproduksi cita-cita mengedepankan aspirasi rakyat. Pembentukan partai progresif pada saat ini juga harus dilakukan menggunakan persiapan yang matang. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan analisis tentang desain pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Tentunya dalam menyusun hal ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga mampu tercipta kekuatan yang kokoh dari rakyat itu sendiri.

Rakyat telah lama memimpikan suatu tatanan pe-

merintahan yang memiliki keterbukaan partisipasi publik, seimbang, dan peka terhadap keresahan masyarakat secara utuh. Tatanan tersebut dapat terwujud melalui gerakan-gerakan berbasis rakyat yang menggebrak keadaan. Kekuatan kolektif menjadi syarat untuk membentuk gerakan-gerakan tersebut. Kita bisa ambil contoh pemerintahan Lula da Silva di Brazil. Pemerintahan tersebut berhasil melahirkan pemimpin yang berasal dari kelas bawah. Selain itu, keberhasilan Lula da Silva menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Brazil dapat menjadi bahan belajar bagi kita. Karena sejak reformasi, masyarakat Indonesia malah semakin terpecah-pecah. Menurut saya terbukanya kebebasan berekspresi pasca-Reformasi malah menghadirkan masyarakat yang terpecah-pecah. Mahasiswa hanya memperjuangkan persoalan pendidikan dan buruh hanya memperjuangkan persoalan perburuhan. Penindasan struktural yang disebabkan oleh kapitalisme, membuat saat ini waktu yang tepat untuk menyatukan masyarakat kembali. Namun mengulang keberhasilan di Brazil menjadi sulit karena adanya kriminalisasi terhadap mereka yang kritis dan sedang memperjuangkan keadilan di negeri ini.

© Inggrid/BAL

erakan Rakyat
artai Politik

Menurut Anda bagaimana seharusnya partai berbasis gerakan rakyat menghimpun basis keanggotaan dan membentuk idealismenya agar dapat berdampak signifikan terhadap proses politik?

Karena penindasan yang dilakukan secara meluas, entitas politik rakyat ini tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari satu kelompok masyarakat. Basis gerakan rakyat harus berasal dari masyarakat di sektor mana pun asal mereka mendapatkan porsi penindasan dari rezim. Oleh karena itu, bagi saya golongan yang dapat berafiliasi ke dalam entitas politik adalah mereka yang mempunyai kerelaan untuk terjun dalam perlawanan.

Dari latar belakang tersebut terdapat idealisme yang perlu ditanamkan agar partai berbasis gerakan rakyat mampu signifikan terhadap proses politik. Idealisme mencakup nilai, isu dan tujuan yang harus diprioritaskan oleh partai gerakan rakyat. Nilai yang harus diprioritaskan adalah keberpihakan kekuasaan kepada rakyat. Partai gerakan rakyat haruslah senantiasa hadir di tengah masyarakat serta menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan. Nilai ini penting untuk diprioritaskan dengan melihat situasi saat ini ketika pemerintah semakin mengutamakan kepentingan pemodal sehingga memicu krisis kepercayaan di mata masyarakat.

Selain itu terjadi kemunduran pada ruang-ruang demokrasi yang ditandai dengan adanya tuduhan bahwa gerakan rakyat ditunggangi oleh kepentingan oknum. Ada pihak yang memang ingin merusak citra gerakan melalui propaganda-propaganda tak berdasar. Kondisi krisis seperti ini perlu menjadi pacuan kepada masyarakat untuk menyatukan suara yang berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Prioritas untuk berpihak kepada rakyat menjadi penting untuk menyalakan kembali ruang-ruang demokrasi rakyat sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tentunya hal ini bisa dilakukan dengan mencoba kembali membawa gerakan rakyat ke dalam kontestasi pemilu.

Bagi saya hanya ada dua pilihan dalam penyatuan kekuatan dari rakyat tertindas, *pertama* melalui jalur cepat dengan menggalakkan mosi tidak percaya. Dalam hal ini diperlukan kekuatan massa yang besar untuk melakukan pergerakan karena rezim saat ini semakin tidak berpihak kepada rakyat. Atau, *kedua*, membangun kendaraan politik untuk masuk ke dalam pemilihan umum. Banyak yang sudah mencoba dan gagal karena ada kendala yang besar yang membuat hal itu tidak terealisasikan.

Pada kedua pilihan tersebut, entitas politik ini wajib mengonsolidasikan aspirasi dan kekuatan rakyat untuk menciptakan integrasi dan solidaritas masyarakat. Sehingga menjadi krusial bilamana terdapat persoalan dan cita-cita rakyat yang harus segera diselesaikan. Tujuan utama dari partai rakyat harus lebih dari meraih kekuasaan. Tujuan sejati dari partai tersebut adalah pembangunan manusia secara inklusif dan terintegrasi demi tercapainya kepentingan yang lebih besar. Tentunya, untuk itu, partai ini harus mampu memahami kepentingan dan arah gerakan masyarakat ke depan.

Bagaimana mempertahankan idealisme dari partai gerakan rakyat?

Berbagai macam tantangan pasti hadir dalam upaya pembentukan gerakan rakyat yang kuat. Tantangan yang paling signifikan terwujud dalam pemangku kekuasaan yang hegemonik. Mereka menghegemoni dengan mengadu antar masyarakat menggunakan dalih mendengarkan dan ikut berjuang bersama rakyat. Upaya mereka tersebut dapat menimbulkan pertikaian antara masyarakat yang tertindas dan dapat memecah persatuan gerakan. Selain itu, gerakan oleh rakyat juga dihadapkan pada ancaman kekerasan fisik. Menghadapi ini kita dituntut untuk harus saling menguatkan, menjaga, dan percaya. Bagi sebuah gerakan, hadirnya kejujuran, kedisiplinan, dan konsesi terhadap perjuangan menjadi penting.

Dalam rangka mempertahankan idealisme, membangun kemandirian gerakan menjadi hal yang penting supaya gerakan tidak mudah ditunggangi. Kemandirian gerakan yang dimaksud adalah kemandirian finansial serta kemandirian dalam menginisiasi, merancang, dan mengonsolidasi isu. Namun kemandirian sebenarnya merupakan hal yang sulit dilakukan karena harus dilakukan dengan mengeluarkan tenaga dan perencanaan yang cukup kompleks.

Selain kemandirian, keterbukaan, dan komunikasi yang baik adalah hal yang perlu dimiliki oleh partai gerakan rakyat agar tidak dikooptasi. Kedua hal itu menjadi penting karena dapat menempatkan gerakan di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberikan pemahaman dan pendidikan. Sebagai konsekuensinya, partai rakyat perlu membangun narasi kampanye sejelas mungkin agar tidak bisa dituduh apa pun. Terlebih lagi, entitas politik yang terbuka akan semakin mengakomodasi munculnya gagasan dan ide besar bagi gerakan perlawanan. **[Asyraf, Hana]**

Partai Rakyat atau Partai Alternatif: Apa itu?

© Ananta/BAL

Memang di kalangan aktivis politik di Indonesia sering kita dengar perbincangan tentang kebutuhan akan sebuah partai rakyat atau partai alternatif. Di kalangan aktivis serikat buruh juga sering kita dengar perbincangan tentang kebutuhan akan sebuah partai buruh. Sebuah partai rakyat, katanya, bisa menjadi sebuah partai atau kekuatan alternatif.

Tetapi apa itu sebuah partai rakyat atau partai alternatif? Buat saya sebagai orang yang mengamati diskusi-diskusi ini dari jauh, semua ini belum jelas. Semua partai politik di Indonesia mengaku partai rakyat dan pada saat pemilu semua dapat jutaan suara dari rakyat. Jutaan. Elite politik-ekonomi di Indonesia sangat kecil tetapi total jumlah suara elite itu bukan jutaan. Jadi memang rakyat yang memilih partai-partai itu. Semua partai yang ada juga menawarkan diri sebagai alternatif—alternatif pilihan daripada partai lainnya.

Topik soal partai alternatif ini dikaitkan dengan demonstrasi menolak perubahan terhadap UU KPK tahun lalu dan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Dari ini saya berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sebuah partai rakyat ataupun partai alternatif adalah sebuah partai politik yang juga sepakat akan penolakan UU KPK maupun UU Cipta Kerja, dan kebijakan sejenisnya. Jadi yang dimaksud adalah sebuah partai rakyat alternatif yang tertentu, yaitu yang bertolak belakang dari perspektif dua kebijakan dan undang-undang ini.

Tetapi kalau memang bertolak belakang dan menolak perspektif pemerintah dan parlemen ini, apa tawaran persis dan lengkapnya?

Definisi atau gambaran watak sebuah organisasi politik akan tergambarkan oleh program politiknya: apa yang diperjuangkan persisnya dan bagaimana memperjuangkannya sampai berhasil. Lempar sana sini istilah 'partai rakyat' dan 'partai alternatif' kurang berguna tanpa pembicaraan serius tentang programnya.

Sebenarnya kekosongan dalam politik gerakan soal program ini mencerminkan kelemahan utamanya. Kelemahan ini memang juga produk nyata sejarah politik Indonesia sejak 1965. Selama Orde Baru pertarungan politik dan ideologi dimatikan. Di satu sisi ini bisa diungkapkan dengan frasa seperti 'mengalami 32 tahun rezim otoriter', 'tidak ada demokrasi', dan lain-lain. Tetapi yang dialami Indonesia lebih dahsyat lagi sebenarnya. Dan ini adalah sebuah kedahsyatan yang memang mematikan kesadaran tentang berprogram. Untuk mengerti substansi dari kedahsyatan ini kita harus ingat beberapa hal dasar tentang sejarah Indonesia.

Ketika terjadi Proklamasi Kemerdekaan 1945, kemudian birokrasi dan tentara Belanda kalah dan pulang pada 1949, kemudian disusul dengan pengusiran pengusaha Belanda pada 1956—1958, Indonesia baru sedang dibentuk. Pertarungan politik dan ideologi yang terjadi selama tahun 1945—1965 memiliki sifat tertentu yang kita semua harus catat dan hayati. Jika tidak, kita tak akan bisa mengerti sejarah Indonesia dan asal-usul situasi yang dihadapi sekarang.

Apa sifat yang harus dihayati itu? Pertarungan ideologis dan politik adalah sangat sengit di antara berbagai kubu masyarakat pada tahun-tahun itu. Ini merupakan pertentangan tentang bagaimana masyarakat akan menjawab pertanyaan: negeri baru Indonesia ini akan jadi negeri yang bagaimana?

Dengan kata lain, 1950—1965 Indonesia masih dalam proses mendefinisikan diri dalam realitas. Ada berbagai visi saling bertarung. Dan bahkan sejak tahun 1920-an, pemikir-pemikir berbagai kubu sudah menulis dan berpidato, dan berorganisasi dalam rangka memajukan visinya, ***dengan programnya*** masing-masing. Berjilid-jilid analisa dan penjelasan-penjelasan programnya. Tetapi pada 1965, pertarungan antarvisi dan program ini berhenti. Proses ini berhenti bukan karena salah satu visi sudah diterima di masyarakat oleh mayoritas rakyat secara mantap dan terkonsolidasi. Proses ini berhenti karena memang dihentikan melalui aturan-aturan dan tindakan represif. .

Orde Baru tidak sekadar sebuah rezim otoriter tetapi sebuah kekuasaan negara yang memaksakan ***definisi final*** tentang apa itu dan bagaimana itu Indonesia. Dengan segala sesuatu diproklamasikan sudah final berakibat pada tiadanya tempat buat penawaran program-program yang memperjuangkan masa depan lagi. Kesadaran berprogram, kesadaran visi masa depan, bahkan pemikiran apapun tentang masa depan negeri hilang dari budaya politik Indonesia. Masa depan tidak akan lebih daripada masa sekarang diteruskan sampai selamanya.

Jadi kalau memang ada yang tak ingin seperti itu, tidak cukup sekedar aksi protes hal ini atau itu, harus gerakan aksi perubahan berprogram. Apa secara persis dan komprehensif visi masa depannya buat negeri dan, yang tidak kalah pentingnya, apa langkah-langkahnya untuk berhasil membangun gerakan tersebut sehingga kemudian gerakan itu bisa berhasil mencapai perubahan-perubahan yang diinginkannya. Zaman kolonialisme, Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Syahrir, dan M. Natsir semua menulis banyak sekali materi untuk menjelaskan visinya, sambil juga berorganisasi dan bergerak secara politik. Mereka semua yakin dan bangga dengan visinya masing-masing sampai bekerja keras dan keluar masuk penjara karena ide-idenya.

Apa ide dan tulisan mereka masih berguna dalam rangka menyusun program untuk zaman depan? Semuanya berguna dipelajari. Kalau saya sendiri, saya paling terpesona pemikiran Soekarno yang bisa kombinasikan analisis ilmiah terhadap situasi, semangat kebangkitan dan keadilannya, dan seni sastra pembangkitan. Bisa saja di antara teman-teman Indonesia memiliki penilaian berbeda, bahkan sudah pasti. Akan tetapi, dengan menyatakan pendapat saya tadi itu, saya juga sekaligus yakin bahwa pendekatan 'kembaliisme' tidak akan mempan. Kembali ke Soekarno? Tidak, atau kembali ke siapapun atau kembali ke ini atau itu—tak akan mempan. Kalau di antara angkatan-angkatan kaum muda sekarang ada yang mau mengubah masyarakat negeri dan dunia, programnya harus bukan produk zaman dulu, tapi produk zaman sekarang. Silakan pakai ilmu apapun yang berguna dari pemikir sebelumnya, tapi tak bisa kembali-kembalian.

"... apakah itu artinya sebuah partai politik?"

Akan tetapi, bukan hanya program masalahnya.

Juga adalah masalah apakah itu artinya sebuah partai politik? Apakah diartikan sebagai organisasi yang terutama memajukan calon pada saat-saat pemilu? Atau diartikan sebagai organisasi politik yang membangun dan memimpin sebuah gerakan di masyarakat yang terus-menerus bermobilisasi menuntut apa yang dianggap perlu, sesuai dengan program yang ditawarkan? Menembus masuk ke medan elektoral dilihat terutama sebagai cermin berhasil membangun kekuatannya sebagai kubu dan suara politik nasional.

Untuk mereka di masyarakat yang tidak puas dengan program pemerintah dan keadaan masyarakat serta serius ingin terjadinya perubahan, seperti KPK diperkuat atau UU Cipta Kerja dicabut, dengan sendirinya pasti akan menilai bahwa dibutuhkan sebuah kekuatan yang terorganisir. Tetapi melihat demonstrasi sejak 2019 sampai 2020, kelihatannya bahwa yang berpartisipasi di aksi-aksi ini masih sedikit, hanya puluhan ribu di negeri yang penduduknya hampir 300 juta orang. Kecilnya aksi-aksi ini menunjukkan apa yang seharusnya menjadi prioritas kalau memang merasa bahwa butuh kubu 'alternatif'. Apa itu? Sambil terus mendukung dan mendorong aksi-aksi seperti selama ini, harus menjadikan prioritas menyusun programnya sekomprehensif mungkin dan bekerja keras sekali untuk menyampaikannya kepada sebanyak mungkin masyarakat, sehingga mengerti dan menghayatinya. Meminjam slogan seseorang: kerja, kerja, kerja! Atau yang lebih sempurna, kutip Soekarno: "Bukan banyak bekerja, jangan banyak bicara, tetapi banyak bicara, banyak bekerja!"

Max Lane, penulis buku *Unfinished Nation* (2014) dan *Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia* (2017)—Fisipol, UGM.

Tidak Hanya Oposisi, Tapi Proposisi

Judul Buku
Crowds and Party
Penulis
Jodi Dean
Penerbit
Verso Books
Tahun Terbit
2016

Pada 15 Oktober 2011, ribuan massa menyesaki New York Times Square. Poster bernada protes terus diacungkan siang itu. Beberapa orang bergantian memegang mikrofon untuk berorasi. Mereka menuntut penyelesaian atas krisis ekonomi yang tengah melanda Amerika Serikat. Massa aksi menilai krisis itu disebabkan oleh aktivitas gelap korporasi yang berkantor di Wall Street, berlokasi di New York Times Square. Sekitar tiga puluh ribu massa aksi memekikkan slogan "*We are the 99 percent*". Gerakan ini kemudian dikenal dengan sebutan Occupy Wall Street.

Setelah menduduki Times Square, massa aksi berpindah menuju Washington Square Park. Di sana akan dilangsungkan rapat umum (*general assembly*). Terinspirasi dari pengalaman gerakan protes di Spanyol, Argentina, dan Meksiko, gerakan Occupy Wall Street turut menggunakan metode rapat umum dalam pengambilan keputusan. Rapat umum saat itu bertujuan untuk memutuskan pilihan tindakan selanjutnya, sebab polisi sudah mulai membentuk barikade dan menghalangi massa aksi lain bergabung ke dalam Washington Square Park. Massa aksi lantas dihadapkan pada dua pilihan: bertahan atau bubar.

Dalam kondisi yang serba tak pasti itu, salah satu massa aksi naik ke podium, mengambil mikrofon. Ia mengatakan, "tidak ada yang bisa memutuskan untuk Anda. Anda harus mengambil keputusan sendiri. Setiap orang adalah individu yang otonom!". Beberapa orator selanjutnya turut mengafirmasi seruan itu. Alhasil, massa aksi tidak jadi menduduki Washington Square Park, bahkan tidak menunjukkan upaya untuk melakukannya.

Salah satu orang yang hadir pada aksi protes itu adalah Jodi Dean. Dia menggunakan pengalamannya sebagai massa aksi di Washington Square Park malam itu untuk menulis buku *Crowds and Party*. Dean

menilai bahwa apa yang terjadi di Washington Square Park malam itu adalah sebuah degradasi permasalahan kolektif menjadi permasalahan individu. Mengartikan 'otonomi' sebagai keputusan individu, bagi Dean, setali tiga uang dengan menghancurkan potensi kolektif yang dimiliki massa aksi.

Dean menuliskan massa aksi dalam buku ini dengan sebutan kerumunan (*crowds*). Tentu, dia tidak menolak peran dan potensi yang dimiliki kerumunan dalam setiap upaya perlawanan. Di seluruh dunia, kita bisa melihat kerumunan memiliki peran signifikan sebagai oposisi di hadapan kekuasaan. Bahkan Dean sendiri menyebut kerumunan sebagai kekuatan yang destruktif, kreatif, tidak terduga, intens, tapi cuma bersifat sementara. Kerumunan mengekspresikan kekuatan paradoks dari orang-orang sebagai subjek.

Maka, berdasarkan apa yang terjadi di Washington Square Park, Dean sampai pada kesimpulan bahwa kerumunan sejatinya memiliki keterbatasan. Dengan segenap potensi yang dimilikinya, kerumunan tidak dapat berfungsi sebagai sarana menciptakan transformasi sosial-politik. Berdasarkan definisinya saja, kerumunan itu sifatnya sementara. Dalam berbagai aksi protes, seringkali massa aksi pulang begitu saja selepas aksi, dengan kenyataan tuntutan yang gagal terpenuhi, ditambah lebam di sekujur tubuh akibat gebukan aparat.

Artinya, persoalan terletak pada potensi kerumunan yang hanya bisa diaktualkan dalam situasi temporer saja. Potensi yang dimiliki kerumunan hanya bertahan dalam waktu-waktu tertentu dan bisa hilang begitu saja seiring dengan bubarnya kerumunan itu. Untuk itu, Dean secara provokatif mengusulkan dibentuknya sebuah wadah yang dapat menjaga dan merawat potensi yang dimiliki kerumunan, agar perjuangan yang digulirkan dapat berlangsung secara kontinyu. Wadah yang dimaksud oleh Dean adalah sebuah partai.

Argumentasi Dean untuk membentuk partai didasarkan pada potensinya untuk menyerap kekuatan politik yang tercecer dalam kerumunan. Dengan membentuk partai, keinginan kolektif kerumunan dapat dilembagakan, alih-alih hanya sekedar muncul dalam momen protes tertentu. Dalam konteks ini, peran sentral partai terletak pada kemampuannya menangkal individualisme pada level politik. Dengan gamblang, Dean mengatakan bahwa partai berperan untuk mendorong perjuangan menjadi lebih strategis; memusatkan, mengintensifkan, dan mengarahkan orientasi perjuangan, sekaligus mengembangkan analisis dan dapat melangsungkan intervensi yang terorganisir. Tidak hanya sebatas menjadi oposisi, melainkan sebagai proposisi.

Keberhasilan Syriza dalam pentas politik elektoral Yunani dinilai Dean sebagai salah satu momen penting dalam upaya penciptaan wadah perjuangan bersama. Syriza sendiri adalah aliansi dari berbagai partai dan gerakan sosial Kiri di Yunani. Salah satu agenda yang diusung Syriza adalah penolakan terhadap kebijakan pengetatan (*austerity*) melalui hutang yang digulirkan oleh Troika. Tuntutan ini sebelumnya getol disuarakan Syriza lewat partisipasi aktifnya dalam berbagai aksi anti-pengetatan (*anti-austerity*) yang sedang marak terjadi di Eropa saat itu, termasuk di Yunani.

Meski pada 2015 Syriza menjadi sasaran olok-olok karena menerima paket tekanan Troika berupa bantuan hutang dengan prasyarat-prasyarat yang mengatur soal pengetatan, capaian awal Syriza tidak lantas dipandang sebelah mata. Apa yang dilakukan Syriza justru menambal bolong di kalangan gerakan Kiri hari-hari ini: pelembagaan kekuatan pada taraf politik formal.

Kita bisa melihat keberhasilan pelembagaan perjuangan ini di Amerika Latin. Hingga awal dekade 2000-an, meskipun memiliki sumber daya alam melimpah, Bolivia adalah negeri yang hanya dapat dinikmati golongan berduit, kalangan elite, dan kulit putih. Kegagalan pemerintah Bolivia saat itu dalam mengelola sumber daya alam berujung pada ketimpangan sosial antara penduduk berkulit terang dan masyarakat adat. Maka, di tengah kekecewaan yang semakin memuncak, lahirlah partai politik bernama Movimiento al Socialismo (MAS) pada 1998.[1] Partai yang dimotori Evo Morales ini—seorang petani koka dan aktivis—berhasil menekan angka kemiskinan hingga 35 persen. Sebelum Morales berkuasa, kemiskinan di Bolivia mencapai 60 persen dari total populasi penduduk.[2]

Hanya saja, dari sekian banyak keberhasilan pelembagaan perjuangan, Dean seperti terjebak pada bentuk partai sebagai satu-satunya pilihan. Dean cenderung menyamakan perjuangan politik dengan 'program yang jelas dan terukur' dengan sebuah partai politik. Seolah-olah politik alternatif hanya bisa diekspresikan dengan membentuk partai politik lalu mengutusnya ke dalam ruang sidang parlemen. Padahal, banyak gerakan tanpa embel-embel partai politik yang memiliki 'program yang jelas dan terukur' untuk mencapai tujuannya. Movement for Black Lives yang independen secara politik—tidak terikat dengan partai politik tertentu—adalah contoh nyata dari hal ini. Dengan demikian, penciptaan partai politik bukan satu-satunya opsi, apalagi solusi tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan publik.

Terlepas dari itu, poin untuk membentuk wadah bersama yang diajukan Dean tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Penyatuan potensi dalam sebuah wadah setidaknya menjawab persoalan fraksionalisasi gerakan yang acap terjadi hari-hari ini. Dalam bukunya yang lain, Dean mengatakan bahwa organisasi dengan fungsi yang jelas sangat diperlukan untuk keberlangsungan dan keberhasilan gerakan itu sendiri. Amatan Dean terhadap gerakan Occupy justru menunjukkan bahwa slogan 'tanpa bentuk' dan 'tanpa pimpinan' malah memunculkan 'pemimpin informal' (*quasi-leaders*) dan senarai agenda yang dianggap sebagai 'konsensus bersama'. Padahal, agenda-agenda itu sebetulnya muncul dari beberapa 'kelompok dominan' dalam gerakan Occupy. Dalam konteks inilah organisasi dengan fungsi dan orientasi yang jelas justru dibutuhkan dalam proses politik yang deliberatif, transparan, dan sejalan dengan agenda gerakan itu sendiri.[3]

Maka, selain sebagai wadah pemersatu potensi temporer yang dimiliki kerumunan, partai politik juga dapat menjadi perpanjangan tangan dalam proses 'politik formal'. Seperti di Bolivia, kombinasi perjuangan melalui 'politik formal' dan 'politik informal' dapat menciptakan transformasi politik jangka panjang. Tentu usulan Dean terkait pembentukan partai politik tidak bisa diterapkan secara 'pukul rata' dalam setiap kondisi. Ada konteks yang harus selalu jadi pertimbangan dalam setiap upaya merumuskan wadah, agenda, metode, dan capaian dalam setiap perjuangan. Tapi, apabila kita coba tarik usulan Dean itu ke dalam konteks politik Indonesia kiwari, rasa-rasanya usulan itu sepertinya patut untuk dicoba. **[Harits]**

1 Santiago Anria, "Social Movements, Party Organization, and Populism: Insights from the Bolivian MAS," *Latin American Politics and Society* 55, no. 03 (2013): 19—46, doi:10.1111/j.1548-2456.2013.00201.x.
2 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?end=2018&locations=BO&start=2003
3 Jodi Dean, *The Communist Horizon* (London: Verso, 2012), 55.

Siapa Bilang Gerakan Protes Tidak Intelek?

"When the people fear the government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty."
—Thomas Jefferson

Saleh Abdullah, anggota Wali Amanah Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), dan anggota Dewan Tetua jaringan Baileo Maluku.

Gerakan mahasiswa di Yogyakarta mencatat sejarah gerakan lewat beberapa aksi mereka. Gejayan Memanggil salah satu yang paling fenomenal. Pilihan nama itu pun, Gejayan Memanggil, seperti sebuah panggilan magis yang bisa menggerakkan siapa saja untuk berpartisipasi. Bukan cuma buat para mahasiswa, tetapi juga buat banyak ragam elemen masyarakat. Gejayan Memanggil seperti sebuah panggilan, sebuah kode, bahwa keadaan tidak sedang baik-baik saja, di mana setiap rakyat yang mendengar panggilan itu akan tahu di mana mereka harus bertemu dan menyatakan pendapat, menyatakan sikap!

Begitulah faktanya. Pada setiap aksi Gejayan Memanggil, elemen masyarakat yang turun sangat beragam. Bukan cuma mahasiswa. Mahasiswa memang dominan, karena merekalah yang mengorganisir aksi dengan masing-masing rombongan almamater mereka dari segala penjuru menuju jalan Gejayan yang memang berada di antara sekian perguruan tinggi itu. Jurnalis, penulis, dosen, orang tua biasa, para pedagang, seniman dan lain-lain bergerak bersama memenuhi panggilan magis Gejayan Memanggil. Kami yang tinggal di Yogyakarta khususnya, sangat mengerti kode panggilan tersebut. Panggilan yang menggetarkan.

Tetapi gerakan sosial Gejayan Memanggil juga tidak sepi dari kritik, bahkan sinisme dan tudingan keji seperti adanya sponsor dari kelompok politik tertentu yang berseberangan. Yang lebih mengejutkan, kritik dan sinisme itu juga muncul dari kalangan yang relatif terdidik tinggi. Bahkan ada intelektual yang menganggap bahwa gerakan turun ke jalan bukan ekspresi intelektual. Dengan anjuran standar, mending kalian membuat tulisan kritis berbobot, karena turun ke jalan bisa berisiko macam-macam dan tidak intelek!" Begitu kira-kira semburannya yang saya baca di media sosial.

Pandangan tersebut seolah bijaksana dan mencerminkan salah satu tradisi akademik: membuat tulisan. Tapi benarkah gerakan turun ke jalan bukan ekspresi keintelektualan seseorang atau sekumpulan orang? Ada banyak cacat logika dan referensi dari anjuran mencurigakan tersebut, yang bisa menjerumuskan si penganjur ke derajat kadrun bumi datar. Mari kita periksa.

Pertama, hak menyatakan pendapat adalah bagian penting dari Hak Asasi Manusia, karena bersumber dari hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Sementara hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah salah satu dari hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Di lain sisi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah karya agung dari begitu banyak intelektual dan pemikir dari masa ke masa yang senantiasa dibahas dan ditinjau secara reguler pelaksanaannya oleh para ahli terpilih dari banyak negara, juga para wakil negara yang konstitusi atau aturan-aturannya sudah mengikatkan diri dengan deklarasi tersebut.

Lalu bagaimana mungkin ada intelektual yang menganggap bahwa implementasi hak menyatakan pendapat sebagai tidak intelek? Karya para intelektual yang diekspresikan oleh para intelektual dan calon intelektual, dianggap tidak intelek? Kalau Karl Marx masih hidup mungkin ia juga akan mengatakan "politik itu candu." Hanya karena merasa harus membela kubu politik yang satu sambil membeci yang lain, maka akal sehat harus dibuat terkapar?

Kurang berbobot apa para begawan intelektual dunia seperti Rosa Luxemburg, Bertrand Russell, Noam Chomsky, Michel Foucault dan lainnya yang telah melahirkan begitu banyak pemikiran level *milestone* dan dijadikan banyak rujukan dalam dunia akademik? Padahal mereka adalah para demonstran yang pernah ikut turun ke jalan melakukan protes. Di Indonesia ada Arif Budiman, WS Rendra, George Aditjondro, para aktivis perempuan, dosen, seniman yang pernah aktif ikut turun ke jalan melakukan protes. Apa intelektualitas mereka mau diragukan atau dianulir? *Ora mashok, bro!*

Kedua, gerakan protes jalanan juga sering diledek sebagai gerakan naif. Para pejabat atau politisi yang menerima kritik, sering menggunakan argumen, "Oke, kalau Anda tidak setuju dengan sebuah kebijakan, lalu apa solusi dari Anda sendiri?" Ada dua penyesatan di anjuran tersebut. *Satu*, hak menyatakan pendapat adalah hak yang melekat sejak manusia lahir dan harus dihormati. Pembatasannya hanya dimungkinkan kalau pendapatnya itu dianggap melukai hak orang lain. Itu pun masih harus diuji kadar melukainya. Maka kalau sebuah pendapat atau protes baik-baik saja apalagi dengan sejumlah alasan, ia tidak boleh dibebani dengan, "Solusinya apa dong?" Kritik ya kritik saja. Terima dan hormati. Jangan dibebani. Si pembuat kebijakan harus mempelajari protes yang disampaikan, dan kalau benar, ya ubah

© Ananta/BAL

kebijakannya. *Dua*, kalau memprotes sebuah kebijakan, *kok*, ditanya solusi? Artinya solusi kebijakan juga? Memangnya proses legislasi mudah, dan tidak sarat dengan kepentingan politik yang harus diperdagangkan? Tugas gerakan protes mahasiswa hanya memprotes dan menyatakan pendapat, bukan tugas legislasi.

Ketiga, tentang peran intelektual. Ketika Julien Benda menulis *La Trahison des Clercs* (*The Betrayal of The Intellectuals*)—'*Pengkhianatan Kaum Intelektual*'—menurut saya, adalah juga ditujukan ke mereka, para intelektual yang nyinyir terhadap gerakan protes mahasiswa itu. Apalagi, terutama, di antara mereka yang nyinyir itu, jelas-jelas ke mana arah kepentingan politiknya. Mereka yang seolah bersembunyi di balik jubah akademiknya.

Setelah Revolusi Beludru melanda Cekoslowakia, sebagai akibat dari kebijakan Glasnost dan Perestroika di Rusia, di mana akhirnya revolusi damai itu berujung pada pemisahan Ceko dan Slowakia, Milan Kundera menulis sebuah esai ringkas "Paris or Prague?"

Dalam esai itu, Kundera menulis keraguannya akan banyaknya intelektual di Barat yang tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Cekoslowakia. Kundera mencatat para pemikir menyambut *Prague Spring* dengan antusiasme yang diistilahkannya sebagai "kesalahpahaman yang tak terklarifikasi sepenuhnya secara meyakinkan."

Kundera gelisah melihat para intelektual Barat, dengan dalil-dalil egoisnya, sering begitu berminat pada sebuah peristiwa bukan untuk mengetahuinya tetapi untuk memasukkannya ke dalam spekulasi teoretis mereka sendiri. Mereka seperti menambahkan kerikil lain ke mosaik pikiran mereka sendiri. Dengan cara itu tokoh reformasi Ceko, Alexander Dubcek, dalam beberapa hal bisa berada di satu kubu dengan Allende atau Trotsky, dan dalam situasi lain dengan Lumumba atau Che Guevara. Begitulah *Prague Spring* diterima, diberi label—tetapi tetap tidak diketahui.

Mengapa kau memilih memenjarakan dirimu
sementara pintu terbuka lebar?

Bila ada cahaya di hatimu,
akan kau temukan jalan pulang.

(Jalaludin Rumi)

---

1 Milan Kundera, "Paris or Prague?" *Granta* 13: *After The Revolution*, 1984.

Bahasa Indonesia Bukan Milik Badan Bahasa

© Rizky/BAL

"Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu." Andaikata Mohammad Tabrani Soerjowitjitro tidak menyanggah perincian ketiga dalam rumusan yang diusulkan, ketiga butir Sumpah Pemuda takkan memiliki akhir kata yang sama—*Indonesia*. Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perdebatan mengenai bahasa persatuan berputar-putar antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu saja.[1] Sekalipun istilah "Indonesia" telah ada untuk merujuk kepulauan Nusantara berikut orang-orangnya, "bahasa Indonesia" belum diwacanakan. Artinya, penetapan rumusan Sumpah Pemuda sekaligus menjadi hari lahirnya bahasa Indonesia.[2]

Apabila *bahasa* berarti 'sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dalam suatu kelompok', maka definisi itu tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Pada saat itu, bahasa ibu dari masyarakat senusantara adalah bahasa daerah masing-masing. Sementara beberapa dari mereka menguasai bahasa asing, mayoritas di antaranya bercakap-cakap dengan bahasa Melayu pasar yang telah lama menjadi bahasa dalam perdagangan. Dengan demikian, sah dikata bahwa penutur asli bahasa Indonesia belumlah ada. Setelah ditetapkan sebutan "bahasa Indonesia", orang baru menyesuaikan diri dengan kaidah yang diatur mengenai bahasa tersebut; fenomena yang dapat dibilang sebuah anomali.

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meredam ancaman konflik antaretnis yang tidak berhasil dilakukan oleh negara multikultural di sekitar Indonesia, seperti Malaysia dan Filipina. Secara berangsur-angsur, usaha-usaha pengembangan bahasa Indonesia menjadi agenda bersama, mulai dari ahli-ahli bahasa, para jurnalis dalam berita-berita mereka, penulis dengan karya-karya sastranya, hingga politikus dengan orasinya. Penelusuran perkembangan bahasa Indonesia secara historiografi terus dimutakhirkan di kalangan ahli bahasa Indonesia. Sebut saja Harimurti Kridalaksana, Anton M. Moeliono, atau Sutan Takdir Alisjahbana. Peran lembaga Badan Bahasa (pada waktu itu bernama Pusat Bahasa) juga penting dalam pengembangan bahasa Indonesia. Usulan-usulan dihimpun, entri-entri baru diumumkan, kemudian kata-kata tersebut digunakan dalam masyarakat yang kelak menghadirkan penutur-penutur asli bahasa Indonesia.

Kini, terhitung beberapa tahun lagi menuju peringatan seratus tahun Sumpah Pemuda yang diikrarkan sejak 1928 ini. Orang-orang dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pun telah banyak ditemukan. Masyarakat Indonesia telah mempunyai peranan dalam perkembangan bahasa yang mereka gunakan. Hal tersebut menjadikan perkembangan bahasa Indonesia ragam nonformal begitu pesat. Namun, perkembangan itu tidak menuai reaksi yang aktif dari Badan Bahasa. Memang, Badan Bahasa masih menjalankan fungsinya seperti awal perkembangan bahasa Indonesia dahulu, yakni memutakhirkan kamus secara berkala dengan penambahan entri-entri baru dan penetapan kaidah-kaidah penyerapan.

Badan Bahasa merupakan pelaksana operasional dalam pembuatan kebijakan mengenai perencanaan

bahasa. Hal tersebut mencakup pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan peningkatan fungsi bahasa dan sastra, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut, sosialisasi padanan istilah juga termasuk lingkup pekerjaan Badan Bahasa.[3] Hanya saja, efektivitas sosialisasi itu agaknya perlu diuji.

Masalah itu dapat ditemukan pada kesalahan kata-kata yang berasal dari kata asing, seperti *antarktika*, *respons*, dan *frustrasi*. Banyak orang sering kali tersalah dengan memakai kata *antartika*, *respon*, dan *frustasi*. Kesalahan ini perlu disikapi dengan memaksimalkan sosialisasi kebakuan bahasa Indonesia. Namun, di saat yang bersamaan, lama-kelamaan usulan padanan istilah dari Badan Bahasa dirasa jauh dari kata-kata yang digunakan masyarakat. Badan Bahasa takkan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan ketika mereka terus-menerus menyosialisasikan istilah-istilah rumit seperti *luncur gantung* untuk *flying fox* atau *tirah baring* untuk *bedrest*. Pada contoh yang lain, Badan Bahasa justru tidak mengindahkan kata-kata bahasa asing yang telah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia sebelumnya, seperti *elit* dan *hektar*. Kata yang dibakukan oleh Badan Bahasa justru *elite* dan *hektare*. Alhasil, dampaknya adalah antara kosakata yang diatur dan kosakata yang dipakai lantas tidak *gathuk*.

Pegiat bahasa dan kelompok kecil dari masyarakat menyadari adanya benturan ini. Sebab, masalah-masalah kebahasaan telah kerap menjadi topik bahasan dalam dialektika, pun telah banyak publikasi yang mengulas permasalahan dalam bahasa Indonesia, salah satunya buku *Problem Bahasa Kita* oleh Fariz Alniezar. Contoh sederhana adalah maraknya kata *jomblo* yang memiliki intensitas pemakaian tinggi. Alih-alih dimasukkan sebagaimana mestinya, entri yang sesuai dengan definisi dari kata tersebut justru *jomlo*. Contoh lainnya adalah penetapan kata *pensyair* sebagai bentuk baku. Sekalipun bentuk tersebut menaati aturan imbuhan *pe-* dengan *syair*, lidah orang Indonesia cenderung sulit mengucapkannya. Terbukti dari maraknya pemakaian *penyair* walaupun kata tersebut adalah bentuk tidak baku. Pada dasarnya, sebuah kosakata tidak perlu dipaksakan bersikukuh tetap tunduk pada aturan apabila dapat disepakati sebagai pengecualian. Apabila terdapat pola yang ditemukan bermasalah, maka diterima saja demikian.

Metode kerja Badan Bahasa itu tidak jauh berbeda sejak masa awal perkembangan bahasa Indonesia silam, yakni menetapkan aturan dahulu, kemudian menuntut keseragaman. Masalahnya, metode itu seolah-olah mengabaikan realitas bahwa bahasa Indonesia telah digunakan secara masif dan penutur asli bahasa Indonesia ada di mana-mana. Pada keadaan ini, masyarakat Indonesia ikut berkontribusi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan tersebut tidak dihargai oleh Badan Bahasa yang seakan-akan tidak peduli dengan kondisi lapangan dan terus melakukan penambahan istilah dan, bahkan, perubahan kaidah.

Perubahan kaidah pernah dilakukan oleh Badan Bahasa, yakni kaidah mengenai penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang mengatur penyerapan huruf hamzah yang dilambangkan apostrof (').[4] Apostrof tersebut dapat dihilangkan seperti pada *Jumat* atau *taat*, maupun dapat diganti huruf *k* seperti *mukmin*. Akan tetapi, pada akhir 2019, dalam sosialisasi yang dilakukan oleh media sosial resmi Badan Bahasa diumumkan perubahan ejaan bahasa Arab. Salah satunya adalah ejaan kakbah menjadi *ka'bah*. Perubahan lainnya adalah Alquran menjadi *Al-Qur'an*. Lantas, kalau demikian ketetapannya, bagaimana dengan *nuzululquran*, *umulquran*, bahkan *quran* sendiri? Bukankah hal tersebut tidak konsisten?

Memang, bahasa boleh jadi menjadi "tidak konsisten". Misalnya pada perbedaan kaidah penyerapan bunyi *ph* yang diserap dalam kata telepon sebagai huruf *p*, kemudian mengalami perubahan pada kata *mikrofon*, *saksofon*, dan lain-lain. Permisalan lainnya adalah kata *segitiga* yang berbeda dengan *segi empat*, atau bentuk terikat *maha-* pada *mahabesar* yang berbeda dengan *maha esa*. Hanya saja, "ketidakkonsistenan" *telepon-mikrofon* dan contoh lainnya itu terwujud sebagai akibat dari aturan yang ditetapkan bertahap. Hal ini berbeda dengan *kakbah-ka'bah* pada paragraf sebelumnya, ketika ketidakkonsistenan justru terjadi pada pengubahan entri itu sendiri.

Sepertinya, Badan Bahasa masih larut dalam kejayaan pada masa awal perkembangan bahasa Indonesia. Berbeda dengan puluhan tahun lalu ketika masyarakat menunggu usulan-usulan untuk entri baru, saat ini Badan Bahasa sebagai lembaga kebijakan bahasa selaiknya melakukan riset lapangan untuk membaca langkah prioritas. Daripada menggencarkan padanan istilah untuk warna *turquoise* ('biru pirus') yang jarang digunakan, lebih baik masukkan kosakata yang telah umum dipakai dalam masyarakat seperti *distraksi*, *terpekur*, atau *ulayat*.

Permasalahan lain yang menimbulkan tanda tanya adalah minimnya upaya Badan Bahasa untuk memutakhirkan kamus etimologi bahasa Indonesia. Sejauh ini, sangat sedikit jumlah publikasi kamus etimologi, salah satunya yakni *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* yang terbit pada 1987 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, adanya kamus etimologi akan mengurangi protes masyarakat karena asal-usul kata dapat ditelusuri pemakaiannya. Tanpa adanya kamus etimologi, kepada siapa kita bisa bertanya, misalnya, mengapa bentuk baku dari *sendawa* justru *serdawa*? Kalau tidak segera dibenahi, bisa-bisa, Badan Bahasa—yang telah berkontribusi besar bagi masa-masa awal perkembangan bahasa ini—justru secara ironis menghambat perkembangan bahasa Indonesia sendiri. **[Penginterupsi]**

---

1 Rini Kustianti, dkk, "Awalnya Bahasa Melayu sebagai Bahasa Persatuan," Tempo.co, 28 Oktober 2012, https://nasional.tempo.co/read/438136/awalnya-bahasa-melayu-sebagai-bahasa-persatuan, diakses pada 28 Januari 2021.

2 Devina Halim, "Sumpah Pemuda, Sejarah Lahirnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan," Kompas.com, 28 Oktober 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/15495011/sumpah-pemuda-sejarah-lahirnya-bahasa-indonesia-sebagai-bahasa-persatuan, diakses pada 7 Februari 2021.

3 Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014, pasal 16 ayat (2) huruf c, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30633/PP%20Nomor%2057%20Tahun%202014.pdf.

4 Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 63.

Menggelegar Kera Sendiri, Berbuny Seanter

Tiang layar kapal kembali mengembang. Tiada surut pantang berlayar. Kapal itu berdiri gagah menengadah lautan. Menantang kembali ombak-ombak samudera. Sayang bukan alah pada petang, Balairung telah menarik sauh, berniat tak goyah dan mundur pulang. Pelayaran ini dinamakan 'pencarian'. Sahut-sahut orang seberang itu telah terdengar dari berbagai bandar sampai kepada Dapur Balairung di Bulaksumur B21. Ia datang dari Inggris, dapur Balairung berbalas surat dengannya. Aktivitas penerbitan Balairung, Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia Vol. 1 No. 1 "Antroposen" mendapatkan apresiasi dari seorang tuan dari seberang angin. Tuan itu adalah Prof. Leslie Sklair.[1] Ia melakukan penelitian mengenai antroposen dan mendapati pelayaran Balairung ikut mengail wacana yang serupa.

Sahut dari seberang itu kembali terkembang. Dalam peluncuran Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia Vol. 1 No. 2 "Hewan dan Manusia", Balairung mengundang tuan John Sorensen dari Kanada untuk dapat menjadi penceramah dalam acara itu.[2] Dapur Balairung, pada akhirnya, bersahut-sahutan dengan berbagai insan dari penjuru seberang. Batas-batas bangsa itu semakin kabur. Begitu orang-orang menyebutnya era digital. Imbasnya, Balairung lewat portal balairungpress.com (Balpress) lebih kencang bersahutan dengan insan dari seberang, dari negeri tuan Kennedy. Jumlah kunjungan Balpress sejak 2005 sampai dengan kiwari tercatat sebanyak 12 ribu lebih. Sementara itu, kunjungan dari dua jiran Indonesia, Malaysia dan Singapura berjumlah masing-masing lima ribu pengunjung.

Balairung menyadari bahwa data statistik itu tiada mengikutsertakan segala kompleks di baliknya. Misalnya saja, perkembangan teknologi bernama VPN yang dapat memanipulasi *IP Address* sesiapa yang berada di Indonesia terbaca berasal dari sebarang negara yang dipilihnya. Namun, alasan ini tak boleh begitu saja menafikan hasil pelayaran Balairung yang dapat menjangkau hamparan pulau-pulau di sebarang negeri. Balairung, entah sejak kapan, lewat terbitan Majalah Balairung berhasil menjadi pemukim Library of Congress Washington DC, Amerika Serikat. Kabar ini didapatkan dari seorang purna Balairung yang datang berkunjung dan meminta terbitan Majalah Balairung Edisi 56.

Barangsiapa bersuara, sahut-sahut jawaban pasti akan menyusul. Begitu Balairung percaya bahwa upayanya untuk mempertahankan prinsip napas intelektualitas mahasiswa dapat menggema ke segala negeri, tiada cukup berhenti dekat Kepulauan melainkan juga bandar-bandar di luarnya. Sahut-sahut yang mahfuz ini, Balairung dudukkan pada tempat yang sebagaimana mestinya. Tiada jumawa, melainkan tanda bahaya. Isyarat bahwa para pelayar harus menyiapkan bekal dan barangnya. Pelayar Balairung harus menantang samudera baru. Mengejar suara sahut itu, menyampaikan sahut dari Dapurnya.

Pelayaran ini kemudian Balairung jawantahkan dalam upaya menerjemahkan tulisan Balpressnya ke dalam bahasa negeri tuan Chomsky. Majalah yang ada dalam genggaman tuan dan puan sekalian ini, tiada lain, merupakan upaya agar wacana yang dilayarkan oleh Balairung dapat juga menggema dan bersandar di bandar sebarang negeri di luar Kepulauan. Jika media daring Balpress dapat dilayarkan ke sebarang bandar lewat alat bantu berupa alat penerjemahan otomatis, Majalah
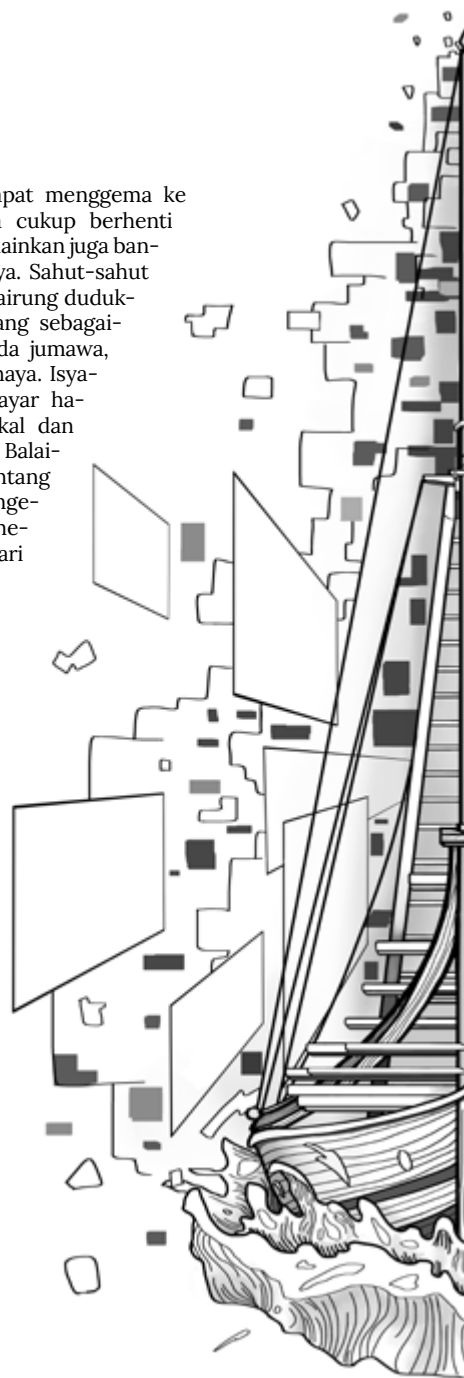
as kepada Rumah yi Merdu kepada o Benua
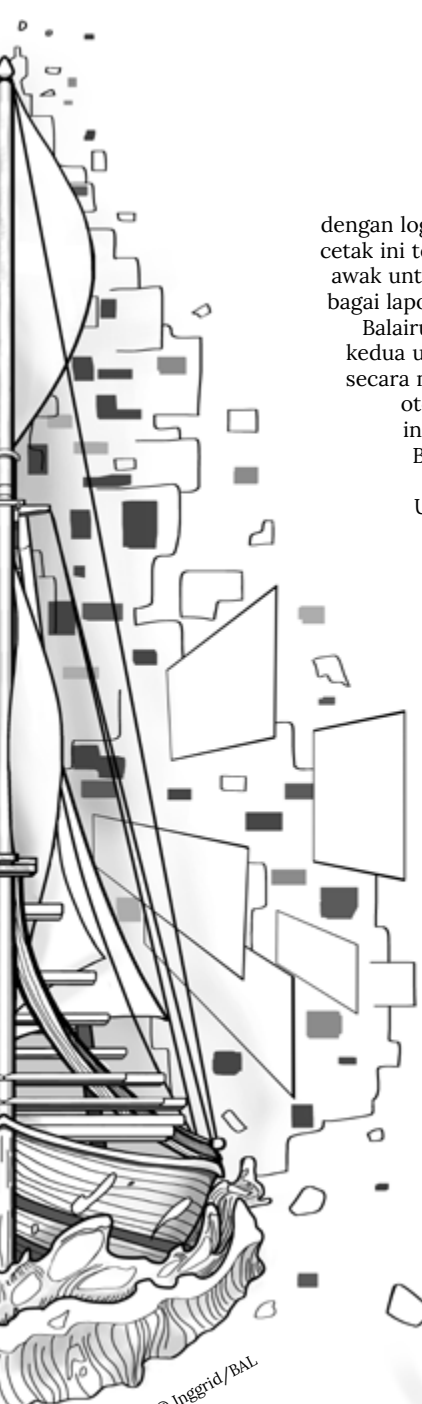
dengan logika penggarapan media cetak ini telah ikut menuntut para awak untuk menerjemahkan berbagai laporan di dalamnya. Dapur Balairung memutuskan bahwa kedua usaha ini perlu dilakukan secara manual. Tiada alat bantu otomatis. Semoga langkah ini dapat turut membantu Balairung menjadi wadah bagi para mahasiswa Universitas Gadjah Mada mempersiapkan 'kehidupan pasca-universiteir'-nya, sebagaimana yang diharapkan oleh mendiang Prof. Teuku Jacob saat awal berdirinya Balairung 35 tahun silam.

***

Apa yang tuan dan puan baca dalam Majalah ini adalah salah satu dari sekian upaya Dapur Balairung untuk mendorong wacana paling kiwari. Partai Rakyat, bunyinya, sebuah penentuan sikap untuk menelusuri langkah-langkah alternatif atas problematika perpolitikan nasional kita. Sebagai sebuah lembaga pers yang percaya bahwa kehadirannya adalah semata demi kebermanfaatan publik, lewat Majalah ini, Balairung mencoba menguji keberadaan dan kebermanfaatannya. Partisipasi publik pembaca secara luas, terang saja, Dapur Balairung nantikan. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa penyaluran isu-isu yang tuan dan puan pembaca lihat, alami, dan dapati di sekitar. Bentuk itu juga dapat berupa gugatan atas berbagai laporan yang keluar dari Dapur Balairung. Tentu saja, syarat utama dari bentuk partisipasi itu perlu dipenuhi terlebih dahulu, yakni membaca produk-produk Balairung.

Dengan demikian, sungguh pun, kritik dan masukkan kepada satu sama lain di antara awak, dan sistem di dalam tubuh Balairung telah dilakukan melalui serangkaian evaluasi kelembagaan, tuan dan puan pembaca sesungguhnya memiliki hak paten untuk ikut menyampaikan penglihatannya atas pelayaran Balairung selama ini. Itu jugalah yang dapat menguatkan hubungan antara Dapur Balairung dengan jagad pembaca. Jangan sampai pelayaran selama ini hanyalah menampakkan sebuah kapal tua di tengah samudera lepas yang hilir mudik mencari Madras, Cape Town, lalu kembali lagi ke Tuban jika telah mendapati diri lelah di ujung benua.

Upaya penerjemahan untuk meluaskan daya jelajah Dapur Balairung, begitu pun dengan penerbitan produk, semata, adalah itikad untuk mengedepankan apa yang signifikan, penting, dekat, dan aktual di tengah masyarakat. Semakin banyak hantaman masalah di dalam, dan di luar kapal, telah memberikan banyak pelajaran bagi Dapur Balairung untuk terus berbenah, menemukan potensi di dalam kapal, kian tangkas membaca uratan ombak, dan percaya diri untuk mencapai bandar-bandar tujuannya. Semoga saja hal-hal demikian jadi alasan utama mengapa pelayaran haram hukumnya untuk terhenti, dan justru menjadi pelontar bagi meriam Balairung untuk menggelegar keras kepada rumah sendiri, dan berbunyi merdu kepada seantero benua.

Akhir kata, beginilah tiang layar terkembang selama semusim angin menerjang. **[Penjaga Dapur]**

---

1 Lihat Leslie Sklair. "Oceania: Big islands, small islands, and the anthropocene." *Anthropocene in Global Media* (New York: Routledge).

2 BALAIRUNG. "Relasi Manusia dan Hewan dalam Critical Animal Studies." Balairungpress (30 April 2019) https://www.balairungpress.com/2019/04/relasi-hewan-dan-manusia-dalam-critical-animal-studies/

Akan Segera Terbit!

"Kematian"

Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia

Vol. 3 No. 1 (2022)

BANK ISU BPPM

Berangkat dari kegelisahan publik atas isu-isu yang sedang berkembang di sekitar kampus dan Yogyakarta, Balairung mengajak seluruh mahasiswa UGM dan masyarakat umum untuk menyampaikan kegelisahan tersebut dalam Bank Isu BPPM.

Isu yang Anda miliki bisa disampaikan melalui
ugm.id/bankisubalairung

Skema

1. Mengusulkan isu
2. Kurasi oleh redaktur
3. Mengontak kembali pengusul isu
4. Reportase

Kontak Redaktur Isu

Line : Ardhias Nauvaly (ardhiasnauvaly)
WA : Haris Setiawan (08978894342)

"Labor Party"

Suatu saat... Ketika demokrasi Indonesia sudah sangat baik...
What?! Semua Labors di tempat ai harus join Labor Party??
Wah, bisa demo everyday nih...
BOSS

Hmmm... Kayaknya ai tau harus ngapain nih...

Nih, money buat you Bikin Labor Party!! Tapi jangan "ribut-ribut"
Wuaaah... Siap Boss!!

Halo Boss... Semuanya udah 'CLEAR'!
Good Job! You memang paling 'COOL'!

LABOR PARTY
Duhh... :(
Ayo, Boss! Kita PARTY!!
makan tuh Party...

Selamat datang
mahasiswa biasa
di kampus yang
biasa-biasa saja

iklan layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh

bppm
balairung
ugm